

**ANALISIS KOMPARASI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PERFORMA PENERAPAN SPBE
DI KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MOJOKERTO**

Skripsi



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh :

**ANGGITO HERNANDO
H76218022**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ANGGITO HERNANDO
NIM : H76218022
Program Studi : Sistem Informasi
Angkatan : 2018

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul: “ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERFORMA PENERAPAN SPBE DI KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MOJOKERTO”. Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2022

Yang Menyatakan,


(Anggito Hernando)

NIM. H76218022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

JUDUL : ANALISIS KOMPARASI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PERFORMA PENERAPAN SPBE
DI KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MOJOKERTO
NAMA : ANGGITO HERNANDO
NIM : H76218022

Mahasiswa telah melakukan proses bimbingan dan dinyatakan layak untuk mengikuti Sidang Skripsi

Surabaya, 04 Juli 2022

Dosen Pembimbing 1



Indri Sudanawati Rozas, M.Kom

NIP. 198207212014032001

Dosen Pembimbing 2



Dr. Eng. Anang Kunaefi, M.Kom

NIP.197911132014031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Anggito Hernando ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi di

Surabaya, 20 Juli 2022

Mengesahkan

Dewan Penguji,

Dosen Penguji 1



Yusuf Amrozi, M.MT.

NIP. 197607032008011014

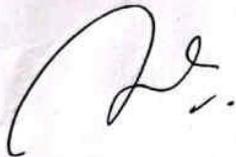
Dosen Penguji 2



Andhy Permadi, M.Kom

NIP. 198110142014031002

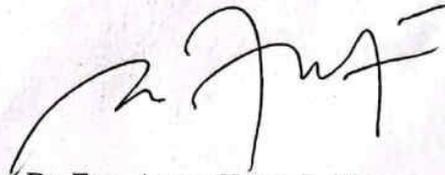
Dosen Penguji 3



Indri Sudanawati Rozas, M.Kom

NIP. 198207212014032001

Dosen Penguji 4



Dr. Eng. Anang Kunaefi, M.Kom

NIP.197911132014031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Jember Ampel Surabaya



Dr. Saepul Hamdani, M.Pd

NIP. 196507312000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANGGITO HERNANDO
NIM : H76218022
Fakultas/Jurusan : SAINS DAN TEKNOLOGI/ SISTEM INFORMASI
E-mail address : ITTOCARRER@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERFORMA

PENERAPAN SPBE DI KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MOJOKERTO

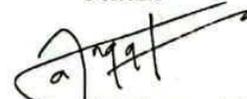
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2022

Penulis


(Anggito Hernando)

ABSTRAK

ANALISIS KOMPARASI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERFORMA PENERAPAN SPBE DI KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh:

Anggito Hernando

E-government atau di Indonesia yang dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah diterapkan sesuai dengan PERPRES No. 95 Tahun 2018 mengenai SPBE. Pada penelitian ini akan membahas mengenai faktor performa yang mempengaruhi penerapan SPBE yang ada pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto serta melakukan komparasi antar dua daerah tersebut. Untuk faktor performa pada penelitian ini menggunakan hasil mapping antara *Digital Service Provision System of System Framework* oleh Samantha Papavasilou dengan PERMENPAN No. 5 Tahun 2020. Hasil dari mapping tersebut menghasilkan 17 faktor performa. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *Exploratory Factor Analysis* (EFA). Hasil dari penelitian ini adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto mempunyai faktor performa yang relatif sama namun jika diperbesar atau dilihat lebih spesifik ke dalam lagi antara Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto memiliki karakteristik faktor performa yang berbeda. Dan dari 17 faktor performa tadi di analisis menggunakan EFA dan menghasilkan 5 faktor performa yaitu regulasi SPBE, literasi digital, manajemen infrastruktur TI, SDM dan lokasi system. Dari kelima faktor tersebut faktor yang dominan yang mempengaruhi penerapan SPBE di dua daerah tersebut adalah faktor regulasi SPBE.

Kata Kunci : *E-Government*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, EFA, GRMS.

ABSTRACT
COMPARATIVE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF SPBE IMPLEMENTATION IN SURABAYA CITY AND MOJOKERTO REGENCY

By:
Anggito Hernando

E-government or in Indonesia known as the Electronic-Based Government System (SPBE) which has been implemented in accordance with PERPRES No. 95 of 2018 concerning SPBE. In this study, we will discuss the performance factors that affect the implementation of SPBE in the City of Surabaya and Mojokerto Regency and make a comparison between the two regions. For the performance factor in this study using the results of the mapping between the Digital Service Provision System of System Framework by Samantha Pa-pavasilou with PERMENPAN No. 5 of 2020. The results of the mapping produce 17 performance factors. This study uses quantitative research with data collection methods using questionnaires and for data analysis in this study using Exploratory Factor Analysis (EFA) methods. The result of this study is that the City of Surabaya and the Regency of Mojokerto have relatively the same performance factors, but when enlarged or viewed more specifically, the City of Surabaya and Mojokerto Regency have different characteristics of the performance factors. And from the 17 performance factors, they were analyzed using EFA and resulted in 5 performance factors, namely SPBE regulation, digital literacy, IT infrastructure management, HR and system location. Of the five factors, the dominant factor influencing the implementation of SPBE in the two regions is the SPBE regulation factor..

Keywords: E-Government, Electronic-Based Government System, GRMS, EFA.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Teori Dasar.....	12
2.2.1. <i>E-government</i>	13
2.2.2. Penerapan Sistem	15
2.2.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	16
2.2.4. PERMENPAN No. 59 Tahun 2020	17
2.2.5. Efektivitas Transformasi Digital <i>E-government</i>	18
2.3. Integrasi Keilmuan.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.1.1. Pemetaan Masalah.....	23

3.1.2. Studi Literatur	23
3.1.3 Jenis Data	24
3.1.4 Profil Organisasi.....	24
3.1.5. Perencanaan Instrumen	25
3.1.6. Pembuatan Kuesioner.....	31
3.1.7 Penyebaran Kuesioner.....	33
3.1.8 Uji Validitas	34
3.1.9 Uji Reliabilitas	35
3.1.10 Komparasi Faktor-Faktor Performa	37
3.1.11 <i>Exploratory Factor Analysis (EFA)</i>	37
3.1.12 Pembuatan Kesimpulan dan Penyusunan Laporan	40
3.2 Metode Penelitian.....	40
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1 Instrumen Penelitian.....	42
4.2. Penyebaran Kuesioner.....	45
4.3 Deskripsi Data Sebaran	47
4.4 Uji Validitas	49
4.5 Uji Reliabilitas	53
4.6 Komparasi Faktor Performa	56
4.7 <i>Exploratory Factor Analysis (EFA)</i>	62
4.8 Interpretasi Faktor	68
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
Lampiran	75
Daftar Pustaka.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator.....	29
Tabel 3. 2 Informan Penelittian.....	31
Tabel 3. 3 Tabel Skala Likert.....	33
Tabel 4. 1 Instrumen Penelitian.....	42
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin..	47
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis.....	48
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Korelasi Pearson Product Momen	50
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Fisik	53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Sosial	54
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Kebijakan.....	54
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Kognitif.....	55
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Bisnis	55
Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Digital	55
Tabel 4. 12 Komparasi Jawaban Faktor Performa	56
Tabel 4. 13 Hasil KMO dan Bartlett's Test Provinsi Jawa Timur.....	62
Tabel 4. 14 Nilai Communalities	63
Tabel 4. 15 Rotate Component Matrix Provinsi Jawa Timur	65
Tabel 4. 16 Interpretasi Faktor.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kelebihan PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020.....	18
Gambar 2. 2 <i>Digital Service Provision System of System Framework</i>	20
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian	22
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi DISKOMINFO KOTA SURABAYA	24
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto	25
Gambar 3. 4 Mapping Indikator Bagian 1	27
Gambar 3. 5 Mapping Indikator Bagian 2	28
Gambar 3. 6 Hasil Mapping <i>Digital Service Provision System of System Framework</i> Dengan PERMENPAN No. 59 Tahun 2020 Berdasarkan PERMENPAN No. 59 Tahun 2020	32
Gambar 4. 1 Gambar Kuesioner.....	45
Gambar 4. 2 Foto Responden Kabupaten Mojokerto.....	46
Gambar 4. 3 Foto Responden Kota Surabaya	46
Gambar 4. 4 Karakteristik Responden Kota Surabaya.....	47
Gambar 4. 5 Karakteristik Responden Kabupaten Mojokerto	48
Gambar 4. 6 Karakteristik Seluruh Responden.....	49
Gambar 4. 7 Diagram Komparasi Faktor Performa	57
Gambar 4. 8 Faktor Performa Yang Mempunyai Kesamaan.....	58
Gambar 4. 9 Faktor Dominan Pada Kota Surabaya	60
Gambar 4. 10 Faktor Dominan Pada Kabupaten Mojokerto.....	61
Gambar 4. 11 Tabel Variance Explained Provinsi Jawa Timur	64
Gambar 4. 12 Gambar Scree Plot.....	65
Gambar 4. 13 Interpretasi Nama Faktor Performa.....	70
Gambar 4. 14 Perbandingan Sebelum Dilakukan EFA dan Sesudah Dilakukan EFA	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi yang berkembang pada era ini sudah mengalami perkembangan dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga mempunyai pengaruh dan manfaat kepada segala kegiatan dari segala bidang. Perkembangan teknologi yang begitu cepat mempunyai beberapa manfaat seperti adanya peningkatan kecepatan serta keakuratan terhadap kinerja dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Pada bidang pemerintahan melakukan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk membantu pelayanan agar lebih cepat dan efisien, pemanfaatan itu disebut dengan *e-government* (Silalahi et al., 2015). Dengan adanya *e-government* dapat membuat adanya komunikasi dan interaksi antar sesama pemerintah. Seperti contoh adanya komunikasi dan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah (Supriyanto, 2016).

E-government juga dapat dijadikan sebagai jalan pintas untuk pemerintahan yang lebih baik seperti adanya peningkatan kualitas pelayanan (Nugraha, 2018). Selain itu penerapan *e-government* juga mempunyai fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Sementara itu tujuan dari pengembangan *e-government* adalah untuk membuat sebuah jaringan informasi yang merangkap sebagai transaksi pada pelayanan publik, meningkatkan perekonomian nasional dengan cara membentuk hubungan yang interaktif, membentuk sebuah relasi serta komunikasi dengan beberapa lembaga negara, dengan adanya *e-government* dapat membentuk manajemen sistem baru untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien (Supriyanto, 2016).

Di Indonesia *e-government* mulai diterapkan pada tahun 2001 dengan adanya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 (INPRES). Pada instruksi tersebut berisi pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Kemudian negara-negara maju sudah mulai menerapkan *e-government* dan berhasil akhirnya pada tahun 2003 keluarlah INPRES No. 3 Tahun 2003. Pada instruksi tersebut

mempunyai isi mengenai kebijakan serta strategi Nasional mengenai perkembangan *e-gov* di Indonesia. Tak hanya itu saja Kominfo juga mengeluarkan sebuah panduan untuk menyusun sebuah rencana induk mengenai pengembangan *e-government* (Nugraha, 2018). Pada INPRES tersebut dijelaskan bahwa di Indonesia pengembangan *e-government* dilakukan dengan empat cara yang pertama adalah persiapan, pematangan, pematapan dan pemanfaatan.

Pada tahun 2018 penerapan *e-government* di Indonesia dikenal dengan nama baru yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) No 95 Tahun 2018. Pada PERPRES tersebut membahas mengenai SPBE. Pada tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPANRB) melakukan kegiatan evaluasi SPBE yang dilakukan oleh dua (2) pihak yang pertama dengan metode self assessment yang dilakukan oleh tim penilai internal kementerian, pemerintah dan lembaga daerah. Pihak kedua dengan metode evaluasi dokumen yang dilakukan evaluator eksternal. Evaluasi tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk melihat seberapa jauh progress pelaksanaan SPBE oleh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah serta untuk meningkatkan kualitas SPBE (Astiarasanti, 2020).

Evaluasi itu berdasar pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) No. 5 Tahun 2018 Mengenai Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada website resmi SPBE terdapat hasil evaluasi tahun 2019. Pada evaluasi tahun 2019 Provinsi Jawa Timur mendapatkan indeks SPBE sebesar 3,1 dengan kota atau kabupaten tertinggi adalah pada Kota Surabaya dengan nilai indeks SPBE sebesar 3,72 dan untuk kabupaten terendah pada evaluasi SPBE Tahun 2019 adalah Kabupaten Mojokerto dengan nilai indeks SPBE sebesar 1,55. Pada tahun 2020 MENPANRB mengeluarkan peraturan baru untuk memperbaharui PERMENPANRB No. 5 Tahun 2018. Peraturan tersebut yaitu PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020. Perbedaan PERMENPANRB No. 5 Tahun 2018 dengan yang terbaru yaitu PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020 adalah adanya beberapa amanat dari

PERPRES No. 95 Tahun 2018 yang belum ada pada PERMENPANRB No. 5 Tahun 2018 (MENPANRB, 2020).

Jeda waktu antara keluarnya Peraturan MENPAN RB No. 5 Tahun 2018 dengan Peraturan MENPANRB No. 59 Tahun 2020 kurang lebih 2 tahun. Selama jeda waktu 2 tahun tersebut banyak penelitian yang memiliki topik mengenai evaluasi SPBE di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Seperti penelitian evaluasi SPBE pada Kabupaten Lumajang dengan menggunakan Peraturan MENPANRB No. 5 Tahun 2018 pada tahun 2019 dengan hasil indeks SPBE pada penelitian tersebut adalah 2,85 (Firdaus, 2019). Ada juga penelitian mengenai evaluasi SPBE yang menggunakan Peraturan MENPANRB No.59 Tahun 2020 yaitu pada Kabupaten Gresik dan hasil evaluasi SPBE pada Kabupaten Gresik pada penelitian tersebut mendapat nilai indeks SPBE sebesar 2.54 (Astiarasanti, 2020). Pada tahun 2021 MENPANRB melakukan evaluasi SPBE lagi dengan menggunakan Peraturan MENPANRB No. 59 Tahun 2020.

Dalam penerapan SPBE yang ada di Jawa Timur di kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur tersebut tentunya memiliki faktor-faktor performa yang mempengaruhi penerapan SPBE dan juga berpengaruh terhadap hasil dari indeks SPBE tersebut. Seperti contoh pada penelitian faktor yang dominan dan kurang dominan pada penerapan *e-government* GRMS (Government Resources Management System) yang dilakukan dengan objek penelitian aplikasi GRMS yang ada di Surabaya. Pada penelitian tersebut menghasilkan beberapa faktor yang dominan yang mempengaruhi penerapan *e-government* dan juga ada faktor yang kurang dominan (Maulidhia, 2020).

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas penelitian yang dilakukan rata-rata mengenai evaluasi SPBE dengan menggunakan PERMENPANRB No. 5 Tahun 2018 atau PERMENPANRB No.59 Tahun 2020 dan juga belum ada penelitian yang membahas mengenai komparasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa penerapan SPBE. Oleh karena itu pada penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peforma pada penerapan SPBE di Kota Surabaya daa juga Kabupaten Mojokerto, serta penelitian ini mempunyai tujuan untuk membandingkan atau mengkomparasi faktor-faktor performa pada penerapan

SPBE pada Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Pada penelitian ini juga akan menghasilkan mengenai faktor yang dominan atau signifikan terhadap performa dalam penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan pada latar belakang diatas maka dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana komparasi faktor-faktor performa pada penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto?
2. Apa saja faktor yang paling signifikan pada performa penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana usulan model faktor penerapan SPBE berdasarkan EFA?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan yang sudah dipaparkan di atas ditetapkannya batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.
2. Pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengambilan data dengan menggunakan kuesisioner.
3. Untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor yaitu *Exploratory Factor Analysis* (EFA) dengan bantuan software SPSS.
4. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Januari 2022 - April 2022.

1.4. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini yang mempunyai judul Analisis Komparasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Performa Penerpan SPBE di Jawa Timur mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui komparasi faktor-faktor performa pada penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui faktor yang signifikan pada performa penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui model faktor penerapan SPBE berdasarkan EFA.

1.5. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang dihasilkan bagi beberapa pihak seperti pada pihak pemerintah atau instansi terkait dan bagi pihak akademik.

1.5.1 Bagi Instansi Pemerintah

Dapat memberikan sebuah informasi mengenai faktor yang mempengaruhi performa pada penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto dengan objek penelitian pada DISKOMINFO Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto dan juga memberikan informasi mengenai faktor yang dominan atau signifikan terhadap penerapan SPBE pada dua daerah tersebut.

1.5.2 Bagi Akademik

Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian lanjutan mengenai SPBE dan hasil dari penelitian ini berupa informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi performa pada penerapan SPBE di Kota Surabaya dengan objek penelitian pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto serta perhitungan dengan menggunakan EFA pada faktor signifikan atau faktor yang dominan pada penerapan SPBE pada dua daerah tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada proposal penelitian yang berjudul Analisis Komparasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Performa Penerapan SPBE di Jawa Timur adalah seperti yang ada dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai apa saja yang menjadi alasan adanya penelitian ini atau lebih rincinya pada bab pertama ini diisi oleh pendahuluan pada penelitian ini yang terdiri dari rumusan masalah, latar belakang, batasan, tujuan dan juga manfaat penelitian serta dengan penataan penulisan laporan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini menjelaskan mengenai beberapa teori dasar yang dijadikan dasar dari penelitian ini atau lebih rincinya pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan dari penelitian terdahulu yang berisi beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai topik serupa atau penelitian yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, teori dasar yang dipakai pada penelitian ini dan keintegrasian keilmuan yang berisi mengenai pandangan agama terhadap penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga ini menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian yang logis serta terstruktur mulai dari awal perencanaan penelitian hingga akhir laporan yang meliputi metode penelitian yang dipakai, alur penelitian, instrument-instrumen yang akan dipakai pada penelitian ini serta jadwal penelitian dan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini berisi mengenai pembahasan yang dimulai dari proses pembuatan kuesioner hingga analisis data pada penelitian ini. Untuk lebih jelasnya pada bab ini menjelaskan mengenai instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, proses penyebaran data pada penelitian ini, uji validitas terhadap data yang sudah didapat dalam penelitian ini, uji reliabilitas terhadap data yang sudah didapat dalam penelitian ini, komparasi faktor-faktor performa pada penerapan SPBE di Jawa Timur dan juga faktor dominan pada penerapan SPBE di Jawa Timur.

BAB V PENUTUP

Pada bab yang kelima ini menjelaskan mengenai penutup dari penelitian ini yang berisi mengenai kesimpulan dan saran bagi penelitian selanjutnya. Kesimpulan yang didapatkan dari awal penelitian hingga akhir penelitian dan juga pada bab yang terakhir ini berisi juga mengenai saran peneliti terhadap penelitian lanjutan.

LAMPIRAN

Pada bab ini berisi mengenai bukti-bukti mengenai penelitian ini yang mencakup mengenai beberapa dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan selama penelitian ini dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai referensi-referensi baik buku hingga jurnal-jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dipakai pada penulisan laporan penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berisi mengenai beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang digunakan sebagai referensi selama penelitian beserta dasar teori dari penelitian ini. Tujuan dari dipaparkan teori pada bab ini agar dapat mengetahui dasar-dasar beberapa teori yang dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Ada pula referensi dari penelitian terdahulu yang sejenis untuk mempermudah penelitian ini dan juga pada bab ini ada integrasi keilmuan terkait penelitian ini. Integrasi keilmuan tersebut adalah pandangan dari segi agama yang mempunyai keterkaitan penelitian ini.

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bab ini berisi mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini dan juga pada penelitian ini digunakan sebagai pengetahuan tambahan, namun ada juga penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Tujuan dari penelitian terdahulu ini selain dijadikan sebagai referensi penelitian juga didapatkan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Penulis (Tahun)	Hasil Penelitian
1.	“Pemantauan Dan Evaluasi Teknologi Informasi di Pemerintahan Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020”	Amelia Hayyu Astiarasanti (2021)	Evaluasi SPBE tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan mendapatkan hasil indeks SPBE sebesar 2.54.
2.	“Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain APO Cobit 5 (Studi Kasus: Diskominfo KBB)”	Pradika Adhea Gevani Laksana, Irfan Darmawan dan Rahmat Mulyana (2019)	Penelitian menggunakan metode konseptual dengan menggunakan Cobit 5 dan menghasilkan sebuah rekomendasi rancangan tata kelola TI pada

			Diskominfotik KBB berdasarkan framework Cobit 5
3.	“Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan <i>E-government</i> pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Mode”	Endang Amalia, Adietya (2019)	Evaluasi SPBE pada penelitian yang ini menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan memanfaatkan semua aspek dan indikator UNM menghasilkan nilai evaluasinya sebesar 3.071
4.	“Faktor-Faktor Sukses Penerapan <i>E-government</i> Pada Grms (Government Resources Management System) “	Julia Permata Maulidhia (2020)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif exploratif dan menghasilkan faktor-faktor yang dominan mendorong keberhasilan dan faktor-faktor yang kurang dominan dalam mendukung <i>e-government</i> pada GMS di Surabaya
5.	“Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lumajang menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE.”	Muhammad Alif R. F. (2019)	Evaluasi SPBE pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif serta menggunakan 35 indikator, 7 aspek, 3 domain menghasilkan nilai indeks sebesar 2.85
6.	“Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan PERMENPAN No 59 Tahun 2020”	Aulia Nabilah (2021)	Pada penelitian ini adalah penelitian mengenai Evaluasi SPBE kota Surabaya Jawa Timur. Dengan menggunakan metode kualitatif dan menghasilkan nilai indeks SPBE 3.90

7.	“Factors for extending <i>e-government</i> adoption in Jordan”	Muhammad I. Nofal, Ahmad Samed Al-Adwan, Husam Yaseen, Ghaith Abdulraheem Ali Alsheikh (2021)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menghasilkan bahwa manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap kualitas layanan.
8.	“A Digital Transformation Governance Framework for eGovernment: A Systemic Approach”	Samatha Papavasilou (2020)	Pada penelitian ini menggunakan metode mixed method dan menghasilkan sebuah framework untuk transformasi digital tata Kelola untuk e-government.

Pada penelitian terdahulu yang pertama menjelaskan mengenai kondisi implementasi SPBE menggunakan PERMENPAN No 59 Tahun 2020. Pada penelitian tersebut mendapatkan sebuah hasil yaitu nilai indeks SPBE untuk Kabupaten Gresik sebesar 2.54. Sedangkan predikat SPBE untuk Kabupaten Gresik sendiri dikategorikan “cukup”. Dimana untuk Kabupaten Gresik sendiri perlu meningkatkan kembali penerapan SPBE agar sesuai dengan tujuan dari penerapan SPBE. Untuk predikat cukup dalam penerapan SPBE, tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berada pada posisi 2 (dua) (Astiarasanti, 2020).

Pada penelitian terdahulu yang kedua menjelaskan perancangan tata kelola teknologi informasi pada Diskominfo KBB dengan menggunakan salah satu framework tata kelola yaitu framework Cobit 5. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan tata kelola IT yang berfokus pada peningkatan indeks kematangan SPBE dan menghasilkan proses prioritas APO02, APO05, APO07 dan APO12. Dari proses prioritas dilakukan juga perancangan mengenai rekomendasi 3 aspek yaitu people, process dan technology yang dianggap memiliki peranan untuk meningkatkan kualitas (Pradika et al., 2019).

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah evaluasi SPBE namun menggunakan United Nasional Model (UNM) yang digunakan indikator pengukuran pada penelitian tersebut. Penelitian tersebut bersifat penelitian gabungan

dengan menggunakan metode wawancara serta pengambilan kuesioner untuk pengambilan datanya dan hasil pada penelitian tersebut adalah mendapatkan nilai sebesar 3.071 untuk hasil evaluasinya serta pada penelitian ini diberikan rekomendasi untuk memperbaiki beberapa bagian pada domain yang memiliki nilai rendah dibandingkan yang lainnya (Amalia & Adietya, 2019).

Pada penelitian terdahulu yang keempat merupakan kesuksesan penerapan *e-government*. Pada penelitian tersebut mengambil objek penelitian di Kota Surabaya. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dimana menggunakan metode wawancara untuk pengambilan data. Pada penelitian ini menghasilkan adanya faktor dominan dan faktor tidak dominan yang mendukung kesuksesan penerapan *e-government* di Surabaya. Faktor dominan yang mendukung kesuksesan adalah faktor TIK, kepemimpinan, finansial, proses, tujuan dan nilai. Untuk faktor yang tidak/kurang dominan adalah SDM, stakeholder, regulasi serta kebijakan (Maulidhia, 2020).

Pada penelitian yang dijadikan referensi selanjutnya yang kelima ini sama dengan penelitian terdahulu yang kedua menggunakan Peraturan MENPAN RB No.5 Tahun 2018. Namun pada referensi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar kematangan dari implementasi SPBE yang ada di Kabupaten Lumajang. Pada penelitian ini menggunakan konsep penilaian menggunakan CMM/CMMI dan mendapatkan hasil nilai indeks SPBE nilai indeks sebesar 2.85 (Firdaus, 2019).

Pada referensi penelitian selanjutnya yang keenam menggunakan Peraturan MENPAN RB No.59 Tahun 2020 dan mempunyai tujuan untuk mengukur seberapa besar implementasi SPBE yang ada di Surabaya. Penelitian ini menggunakan semua domain hingga indikator yang ada pada PERMENPAN. Hasil dari penelitian ini berupa nilai indeks domain dari setiap domain sesuai dengan PERMENPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Untuk indeks SPBE Kota Surabaya mendapatkan nilai 3.88 dan dikategorikan sebagai “Sangat Baik”. Yang berarti bahwa Kota Surabaya sudah melakukan penerapan SPBE sesuai dengan aturan atau kebijakan yang berlaku (Nabila, 2021).

Pada referensi penelitian yang ketujuh ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengambilan data dengan angket/kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediasi dari manfaat yang dirasakan, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepercayaan, serta peran moderasi transparansi, dalam adopsi layanan *e-government* oleh warga negara di lembaga sektor publik Yordania. Penelitian ini menghasilkan bahwa manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas layanan (Nofal et al., 2021).

Pada referensi penelitian yang terakhir ini menggunakan metode *mixed method* atau yang lebih dikenal dengan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dan juga pada penelitian ini menghasilkan sebuah framework yaitu *Digital Service Provision Systems of Systems*. Dimana pada framework ini terdiri dari 6 dimensi yaitu *physical system, social system, policy system, cognitive system, business system, dan digital system* dimana dari setiap dimensi pada framework tersebut terdiri dari masing-masing 4 indikator (Papavasiliou, 2020).

Berdasarkan penjelasan dan tabel diatas yang berisi beberapa referensi dari penelitian terdahulu terdapat sebuah perbedaan atau gap penelitian yaitu pada penelitian terdahulu yaitu belum ada yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SPBE dan juga belum ada yang membahas mengenai komparasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SPBE antar daerah. Sedangkan pada penelitian ini akan berfokus pada komparasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa pada penerapan SPBE yang akan dilakukan pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.

2.2. Teori Dasar

Teori Dasar merupakan kumpulan dari beberapa hukum, ide, konsep dan filosofi yang digunakan sebagai fondasi dalam penelitian. Isi dari sub-bab ini adalah gabungan dari hal tersebut yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

2.2.1. *E-government*

E-government yang mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia adalah pemerintahan elektronik. *E-Government* sendiri mempunyai banyak pengertian diantaranya dapat diartikan sebagai penerapan TIK dalam bidang pemerintahan dengan inovatif. *E-government* juga diterapkan dengan tujuan sebagai sarana penyedia akses agar masyarakat mendapatkan informasi serta sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta juga agar masyarakat ikut berperan dalam sebuah proses demokrasi dan kelembagaan (Guo, 2010) Sementara itu ada pula yang membagi menjadi 5 tingkatan mengenai pengertian *e-government* dan semakin tinggi tingkatan *e-government* maka semakin kompleks juga permasalahan yang dihadapi (Argawal, 2000).

Pada tingkatan pertama *e-government* mulai dengan menampilkan sebuah rupa pemerintahan dengan membuat sebuah website pada setiap lembaga pemerintahan. Namun hal tersebut masih mempunyai kekurangan yaitu komunikasi yang dilakukan masih satu arah. Pada tingkat kedua mulai ada interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat melalui sebuah pelayanan publik. Pada tingkatan ketiga sudah ada kerja sama antara sesama instansi pemerintah dalam melakukan pelayanannya, hal ini membuat pelayanan kepada masyarakat lebih efisien. Pada tingkat keempat mulai adanya peningkatan pada arsitektur teknis menjadi lebih kompleks, hal ini bertujuan agar memudahkan masyarakat. Namun anggaran yang dikeluarkan untuk peningkatan ini juga besar, hal ini termasuk keamanan serta pemeliharaan. Tingkat kelima pemerintah sudah membuat sistem “information push” agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang sesuai dari pemerintah (Argawal, 2000).

E-Government dapat juga memperbaiki manajemen internal beserta pelayanan publik sehingga dengan *e-government* mempunyai kemudahan untuk mempermudah serta memperingan kehidupan dan dapat juga untuk mempercepat penyusunan ICT antar daerah (Indrajit et al., 2005). Konsep *e-government* dibagi menjadi empat jenis hubungan yaitu (Suaedi & Wardiyanto, 2010)

1. Pemerintah dengan Bisnis (*Government to Business*)

Pada hubungan pertama adalah hubungan pemerintah ke pemilik usaha/bisnis atau *Government to Business*. Tujuan dari hubungan pertama adalah untuk mendapatkan kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis. Seperti contoh di sini adalah proses perizinan pendirian sebuah usaha atau investasi dan beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memerlukan sebuah informasi *online*

2. Pemerintah dengan Masyarakat (*Government to Citizens*)

Pada hubungan kedua adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. G2C ini memiliki tujuan agar memperbaiki korelasi antara pemerintah dengan masyarakat serta dapat memudahkan masyarakat mencari informasi terkait pemerintahan dan sebaliknya. Pada hubungan ini pemerintah membuat sebuah kebijakan dengan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi. Contohnya yang bisa diambil adalah adanya perubahan dari KTP menjadi E-KTP dan mulai ada website dari lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah yang berisi informasi-informasi terkait dengan pemerintahan.

3. Pemerintah dengan Pemerintah Lainnya (*Government to Government*)

Pada hubungan ketiga yaitu pemerintah dengan pemerintah lainnya. Pada hubungan ini mempunyai tujuan agar informasi antara pemerintah satu dengan lainnya terpenuhi dan untuk mempermudah sebuah kerjasama antar pemerintah lainnya. Contohnya adalah saling bertukar informasi mengenai suatu hal. Contoh aplikasi atau program pada hubungan ini adalah *e-office*, *e-money* dan *e-planning*.

4. Pemerintah ke Karyawan (*Government to Employees*)

Pada hubungan keempat yaitu antara pemerintah dengan para bawahan atau pegawainya. Tujuan dari hubungan ini agar pegawai pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah dapat meningkatkan kinerja serta kesejahteraan dan sebagai upaya dalam memudahkan informasi atau akses berbagai tugas/hasil kerja para pegawai pemerintahan baik pusat maupun daerah. Contoh aplikasi atau sistem pada hubungan ini adalah *e-kepegawaian* dan *e-pensiun*.

E-Government pertama kali diatur di Indonesia adalah oleh Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia. Selang beberapa waktu negara-negara maju sudah memanfaatkan

teknologi yang digunakan dalam bidang pemerintahan, kemudian Indonesia mulai merencanakan menerapkan e-government. Hal itu dibuktikan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003. Dokumen tersebut berisikan mengenai beberapa kebijakan serta strategi nasional untuk pengembangan *e-government*. Jadi hal ini memiliki tujuan untuk menjadikan pemerintah Indonesia menjadi *good governance* dengan *menguprgade* kualitas layanan publik menjadi lebih efektif dan juga efisien (Presiden Republik Indonesia,2003).

2.2.2. Penerapan Sistem

Implementasi atau penerapan adalah pergerakan atau sebuah tindakan yang mempunyai tujuan yang sudah direncanakan (Mulyadi, 2016 p.12). Tindakan yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk berusaha mengubah beberapa tujuan yang sudah ditetapkan menjadi sebuah pola yang mempunyai usaha untuk mencapai sebuah perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh keputusan yang sebelumnya dibuat. Implementasi atau penerapan mempunyai hakikat sebuah upaya mengenai sebuah pemahaman yang terjadi setelah sebuah program dijalankan. Dalam proses persiapan implementasi atau penerapan setidaknya memerlukan beberapa hal seperti metode, unit sumber daya , sebuah pengubah kebijakan menjadi sebuah arahan yang dapat dijalankan dan penyedia layanan.

Sedangkan pada teori Jones penerapan merupakan “Those Activities directed toward putting a program into effect” yang berarti adanya sebuah proses untuk mewujudkan suatu hasil. Penerapan disebut juga sebagai sarana pelaksanaan sebuah peraturan yang menghasilkan akibat serta mengakibatkan efek terhadap sesuatu (Syahida, 2014 p.10). Sedangkan sistem merupakan sebuah kumpulan unsur yang saling berhubungan demi mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Sebuah sistem biasanya mempunyai bagian yang lebih kecil atau yang disebut dengan subsistem yang akan mensupport sistem yang besar (Romney & Steinbart, 2018 p.3). Ada pula yang mengartikan bahwa sistem merupakan sebuah kumpulan komponen yang saling berhubungan demi tujuan tertentu dengan melewati 3 tahap yaitu *input,process* dan *output* (Wongso, 2016 p.13).

Sistem mempunyai 3 komponen yang sesuai dengan pengertian Wongso diatas yaitu masukan atau yang dikenal dengan input, proses dan keluaran atau yang dikenal dengan output. Sistem juga mempunyai beberapa karakteristik seperti adanya komponen sistem yaitu *input*, *process*, *output*, mempunyai batasan sistem yang membatasi antara satu sistem dengan yang lain, mempunyai lingkungan luar sistem (*environment*), mempunyai penghubung atau biasa yang dikenal dengan *interface* dan mempunyai sasaran atau *objective* agar dapat dikatakan sebagai sistem yang berhasil.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi atau penerapan adalah sumber daya, kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, dan karakter dari institusi orang yang melakukan penerapan (Kapioru, 2014 p.105). Untuk berhasil atau tidaknya yaitu kapasitas implementator, akurasi dari instrumen dalam mencapai sebuah tujuan, kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan anggaran, dukungan kelompok, karakteristik kelompok dan kondisi lingkungan meliputi ekonomi, geografi, sosial dan politik dimana implementasi dilaksanakan (Syahida, 2014 p.13).

2.2.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bisa disebut sebagai pengembangan *e-government* di Indonesia dikarenakan pada PERPRES No. 95 Tahun 2018 yang membahas mengenai SPBE. Untuk penerapan SPBE diperlukan sebuah pembaharuan administrasi dalam pemerintahan. Dalam upaya pembaharuan sebuah manajemen negara diperlukannya 2 strategi yang pertama adalah melakukan *rearrange* sistem manajemen administrasi negara yang terdiri dari SDM, proses, struktur serta ikatan dengan masyarakat. Yang kedua dengan mengembalikan kedudukan dan peran lembaga yang menjadi penggerak (Nabila, 2021).

SPBE merupakan salah satu penerapan dari TIK pada bidang pemerintahan. Agar para pengguna layanan SPBE atau masyarakat lainnya dapat merasakan pelayanan yang lebih baik. Tujuan dari SPBE adalah untuk mencapai sebuah *governance* yang bersih, efisien, akuntabilitas dan transparan serta efektif (Nabilah,

2020). Dengan adanya sebuah peraturan tersebut seluruh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah wajib sudah menerapkan SPBE dengan tujuan tersebut. Dalam penerapan SPBE terdapat 3 unsur penting yaitu yang pertama birokrasi pada tata kelola, kemahiran dalam penggunaan TIK dan pelayanan pemerintahan kepada pengguna yang mudah sesuai dengan tugas dan fungsinya (PERPRES No. 95 Tahun 2018, 2018).

SPBE yang ada di Indonesia sudah berada pada tahap penciptaan. Untuk menciptakan SPBE yang efisien diperlukan tata kelola dan manajemen sistem yang baik. Hal itu ditunjukkan dengan pembentukan sebuah team yang dibawah langsung presiden. Tim tersebut bernama Tim Koordinasi Nasional. Dalam pelaksanaannya SPBE harus diterapkan dengan beberapa prinsip diantaranya (PERPRES No. 95 Tahun 2018, 2018)

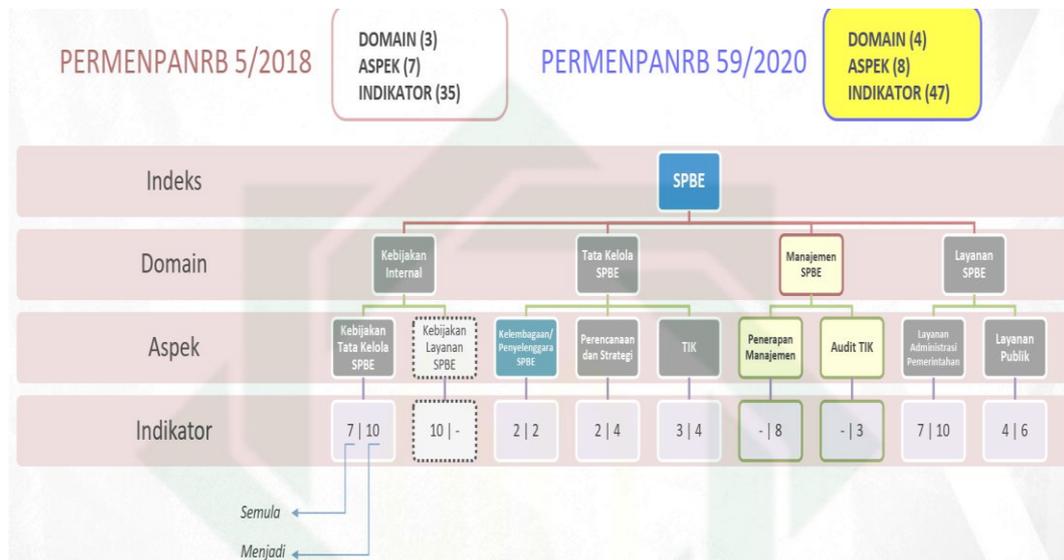
- a. Efisiensi serta pemanfaatan sumber daya pendukung SPBE
- b. Mempunyai kesinambungan upaya SPBE yang dilakukan secara terstruktur dan sesuai perkembangannya.
- c. Fungsi yang jelas
- d. Keterpaduan antara sumber daya yang mendukung
- e. Keamanan dari sumber daya pendukung meliputi menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan keaslian
- f. Efektivitas dan optimalisasi sumber daya pendukung SPBE
- g. Koordinasi dalam penukaran data atau informasi oleh proses bisnis dengan sistem elektronik

Selain itu pengguna dari SPBE terdiri dari pemerintahan daerah, lembaga pusat, pegawai, pemegang bisnis, masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan sebuah pelayanan (PERPRES No. 95 Tahun 2018, 2018).

2.2.4. PERMENPAN No. 59 Tahun 2020

MENPAN-RB pada tahun 2018 lalu sudah mengeluarkan pedoman dalam evaluasi SPBE yaitu PERMENPAN No. 5 Tahun 2018 yang digunakan dalam evaluasi SPBE pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mereka meng-update pedoman mereka yaitu pada PERMENPAN No. 59 Tahun 2020. Pada pedoman yang

terbaru berisi mengenai penambahan beberapa indikator, aspek hingga domain dalam penilaian SPBE. Dan juga pada pedoman terbaru terdapat perubahan pada penilaian dari setiap indikator (MENPANRB, 2020). Untuk perbedaan antara PERMENPAN No. 5 Tahun 2018 dengan PERMENPAN No. 59 seperti pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Kelebihan PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020 (Sumber: MENPANRB, 2020)

Pada pedoman terbaru evaluasi SPBE terdapat 47 indikator dalam 8 aspek dan didalam 4 domain. Domain tersebut adalah kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Dan aspek pada pedoman tersebut adalah kebijakan tata Kelola dan layanan SPBE, perencanaan dan strategi, penyelenggaraan, TIK, penerapan manajemen, audit TIK, layanan public serta layanan administrasi berbasis elektronik. Untuk lebih jelasnya mengenai domain dan aspek dapat dilihat berserta indikator-indikator pada lampiran yang ada dibawah.

2.2.5. Efektivitas Transformasi Digital *E-government*

Dalam memudahkan sebuah organisasi untuk melakukan transformasi digital diperlukan adanya framework. Pada disertasi Samantha Papavasiliou tahun 2020 yang berjudul “*A Digital Transformation Governance Framework for e Government: A Systemic Approach*”. Sesuai dengan pengertian digital transformation atau transformasi digital merupakan perubahan sebuah organisasi

dari segi struktur, strategi, proses serta melibatkan orang melalui penggunaan teknologi serta model bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja (Westerman et al., 2011).

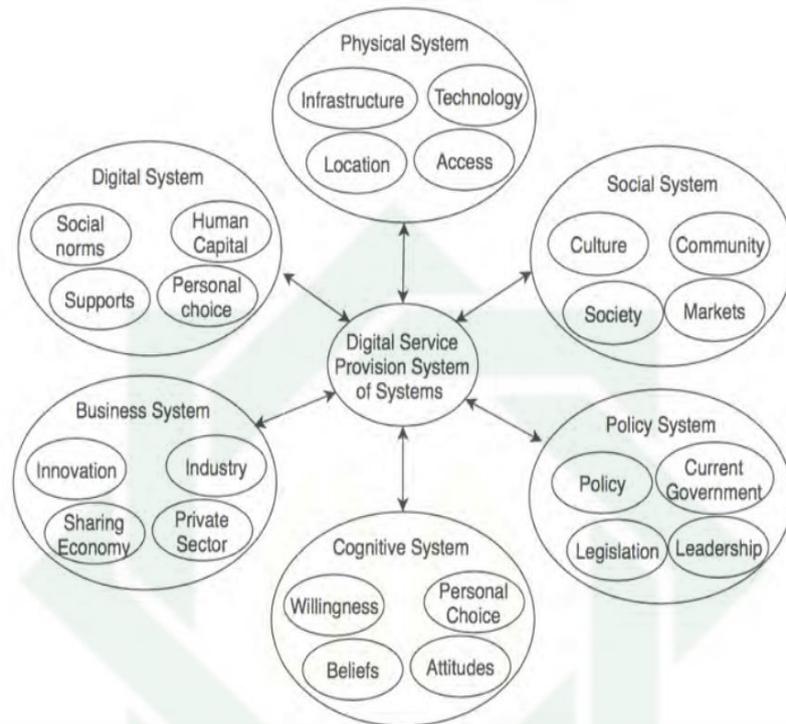
Proses digitalisasi mengacu pada perubahan model dari organisasi tersebut berdasarkan penggunaan aplikasi pada setiap aspek dari organisasi tersebut (Henriette et al., 2015). Sebuah organisasi yang menjalankan proses digitalisasi biasanya lebih mampu dalam membuat produk, struktur, layanan dan model organisasi yang baru berdasarkan kepada penggunaan teknologi yang menggabungkan informasi, komputasi, komunikasi dan konektivitas (Bharadwaj et al., 2013).

Dalam menjalani transformasi digital terdapat empat elemen kunci yaitu penggunaan teknologi, yang mencakup kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru dan membangun standar untuk digunakan. Kedua, perubahan yang berdampak pada penciptaan nilai termasuk mengubah bagaimana model bisnis disusun dan dikelola dalam jangka panjang dan pendek. Ketiga adalah perubahan struktural organisasi, yang meliputi upskilling, pengaturan organisasi (karyawan dan peralatan) dan produk yang digunakan. Terakhir, keuangan perlu dipertimbangkan, di mana biaya menjadi pendorong utama digitalisasi, baik dalam peningkatan biaya jangka pendek maupun penurunan biaya penyediaan layanan jangka panjang (Matt et al., 2015).

Pada disertasi Samantha Papavasiliou menggabungkan analisis tematik dan model GIOA yang digunakan untuk membuat sebuah kerangka *framework* tata kelola yang disebut dengan *governance framework*. *governance framework* ini dihasilkan dari hasil analisis tematik mengidentifikasi empat sistem konstituen utama (kognitif, bisnis, infrastruktur, dan digital) (Papavasiliou, 2020).

Dua sistem lain diidentifikasi secara terpisah. Pertama, sistem sosial diidentifikasi berdasarkan ATO dan penelitian industri. Sistem sosial tidak secara langsung tercermin dalam analisis tematik, norma-norma sosial dan persepsi masyarakat muncul dalam data namun tidak dinyatakan secara jelas. Kedua, sistem kebijakan dianggap vital untuk dimasukkan di luar hasil analisis, karena kebijakan

dan legislasi menjadi dasar transformasi layanan pemerintah dari legacy ke digital (Papavasiliou, 2020). Untuk lebih jelasnya ada pada Gambar 2.2 dibawah ini.



Gambar 2. 2 *Digital Service Provision System of System Framework*

2.3. Integrasi Keilmuan

Pada bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai integrasi keilmuan dimana integrasi keilmuan pada penelitian ini didasarkan pada aspek agama. Dikarenakan aspek agama merupakan sebuah aspek yang dijadikan manusia sebagai landasan hidup. Dalam penelitian kali ini untuk mengetahui integrasi keilmuan dengan perspektif islam di lakukanlah wawancara dengan seorang guru agama pada Madrasah Diniyah yang bernama Ustaz Ahmad Ali S.ag. Wawancara dilakukan via media online menggunakan fitur *video call* aplikasi *whatsapp*. Berikut adalah potongan ayat dari kitab suci al-Qur'an yang menurut ustadz Ahmad Ali mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18).

Pada surat diatas sesuai perlu digaris bawah adalah “memperhatikan apa yang telah diperbuatnya”. Pada surat diatas sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mencari faktor yang paling signifikan dalam penerapan SPBE di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Dan juga kata beliau dalam al-qur’an surat Hud ayat 24 yang berbunyi

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ
مَثَلًا ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Perumpamaan kedua golongan (orang kafir dan mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?.” (Q.S Hud:24).

Pada surat diatas dijelaskan Allah menjelaskan konsep perbandingan dengan perumpamaan orang buta dengan orang tuli dan diharapkan dengan adanya perbandingan tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Hal itu sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk komparasi atau perbandingan antara faktor performa pada penerapan SPBE di Jawa Timur.

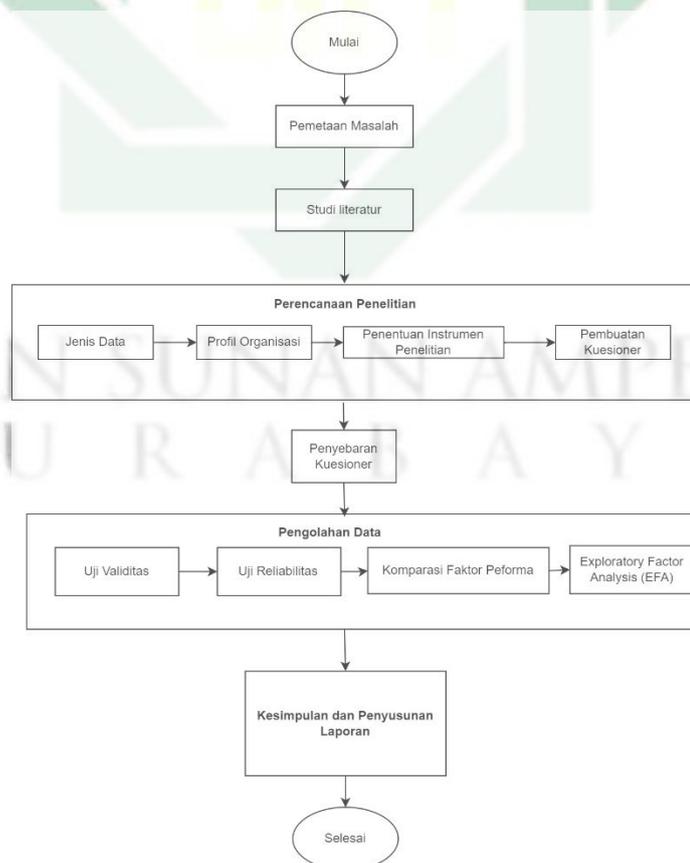
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab yang ketiga ini berisi mengenai penjelasan mengenai metode yang akan digunakan selama penelitian. Berikut untuk detail dari setiap komponen penelitian yang ada pada bab ketiga ini.

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah sebuah rancangan yang berisi mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian dan dijadikan sebagai pedoman (Nasution, 2009). Pada desain penelitian ini merujuk pada penelitian komparatif dimana penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan satu atau lebih variabel pada dua atau lebih populasi/semple (Sugiyono, 2010). Untuk desain penelitian pada penelitian ini akan dijelaskan oleh Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

3.1.1. Pemetaan Masalah

Penerapan SPBE di Indonesia diawali dengan adanya PERPRES No. 95 Tahun 2018 yang membuat kota dan kabupaten di Indonesia harus menerapkan SPBE di wilayahnya. Di tahun yang sama MENPAN RB mengeluarkan pedoman evaluasi SPBE yaitu PERMENPAN No. 5 Tahun 2018. Dimana dari pedoman tersebut munculah indeks SPBE dari setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia pada tahun 2019. Pada evaluasi SPBE tahun 2019 itu Kota Surabaya mendapatkan indeks SPBE tertinggi di Jawa Timur dengan nilai indeks SPBE sebesar 3,72. Sementara itu Kabupaten Mojokerto mendapatkan dengan nilai indeks SPBE terendah dengan nilai indeks SPBE 1,55.

Pada tahun 2020 MENPANRB memperbaharui pedoman evaluasi SPBE dengan mengeluarkan pedoman evaluasi SPBE terbaru yaitu PERMENPAN No. 59 Tahun 2020. Tinggi dan rendahnya hasil evaluasi pada tahun 2019 lalu membuat peneliti ingin mengetahui komparasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa penerapan SPBE dengan mengambil objek penelitian pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.

3.1.2. Studi Literatur

Pada tahap studi literatur ini peneliti mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan topik yang akan dibuat penelitian. Pengumpulan informasi dan pengetahuan dilakukan setelah menentukan konsep penelitian kemudian dilanjut mencari pengetahuan dan informasi yang berupa teori dasar maupun informasi atau pengetahuan yang mendukung sebagai referensi penelitian. Studi literatur dalam sebuah penelitian memiliki posisi yang sangat penting dikarenakan sebuah penelitian memiliki hubungan dan tidak akan terlepas dari apa yang namanya literatur ilmiah (Sugiyono, 2017 p.291). Pada tahap studi literatur ini peneliti mengumpulkan sejumlah literatur dari penelitian lain, jurnal maupun publikasi ilmiah mengenai *e-government*, kegagalan penerapan *e-government*, evaluasi SPBE, pedoman evaluasinya yang diterbitkan oleh MENPANRB, faktor kesuksesan penerapan *e-government* dan juga jurnal-jurnal dan literasi lainnya terkait judul penelitian.

3.1.3 Jenis Data

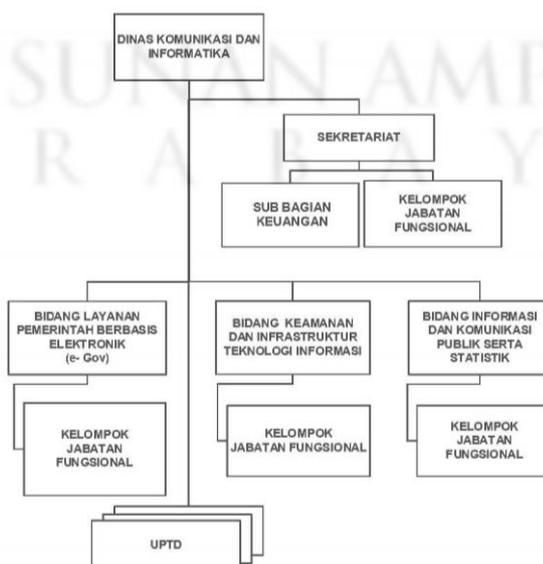
Pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana data kuantitatif merupakan sebuah data yang berisi angka-angka dan dapat dihitung dengan menggunakan statistik serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan terhadap masalah yang diteliti (Sugiyono, 2018).

3.1.4 Profil Organisasi

3.1.4.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

DISKOMINFO merupakan sebuah dinas yang berwenang untuk mengelola bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada daerahnya. DISKOMINFO Kota Surabaya yang beralamat pada Jalan Jimerto No.25-27, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60272. Mempunyai visi dan 4 misi untuk visinya yaitu “Terciptanya Sistem Informasi Pemerintah Kota Yang Terpadu Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi.” Untuk struktur organisasinya sendiri sesuai dengan PERWALI No.82 Tahun 2021 seperti pada Gambar 3.2 berikut

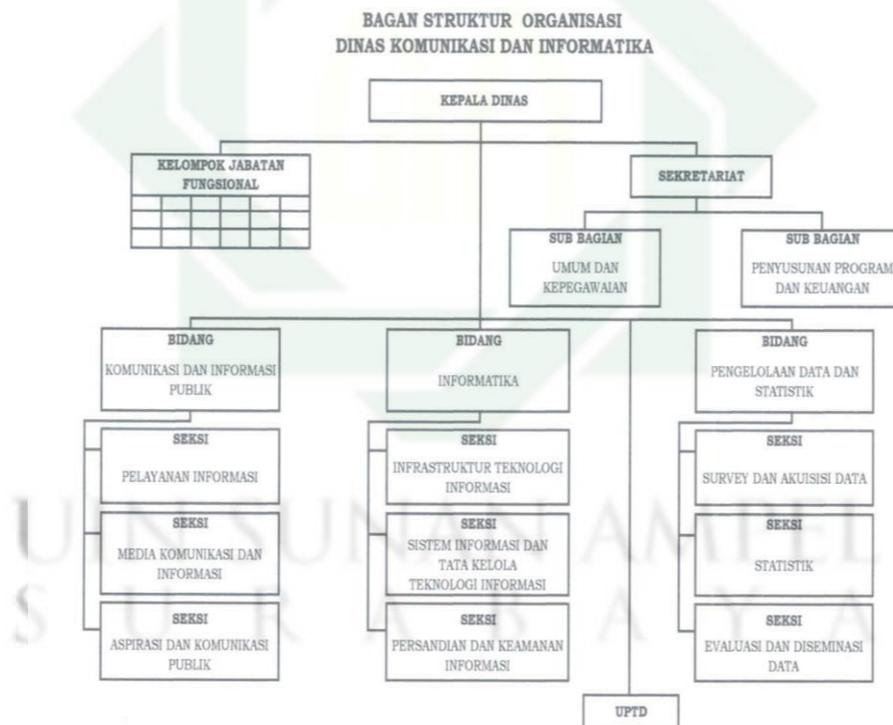
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi DISKOMINFO KOTA SURABAYA

3.1.4.2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto yang berada di Jalan Kyai H. Hasyim Ashari No.12, Mergelo, Kauman, Kecamatan. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61324. DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto mempunyai visi dan 1 misi, untuk visi dari DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto Yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan Serta Kesehatan. Sementara untuk struktur organisasi pada DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto sesuai dengan PERBUB No. 25 Tahun 2021 seperti pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto

3.1.5. Perencanaan Instrumen

Pada tahap perencanaan instrumen ini berisi mengenai perencanaan instrumen penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor performa pada penerapan SPBE Pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

dengan pendekatan kuantitatif. Dimana pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan dengan angka-angka yang diolah dan dianalisis.

Pada penelitian ini penyusunan instrumen kuesioner dibuat dengan mapping antara PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020 dengan framework *effective digital transformation of e-government* pada disertasi Samantha Papavasiliou yang sudah dijelaskan diatas. Untuk mappingnya peneliti menggunakan cara menerjemahkan framework *framework effective digital transformation* agar mempermudah dalam mencari pengertian dari setiap indikator *framework effective digital transformation* di internet. Kemudian mencari kata kunci dari pengertian setiap indikator *framework effective digital transformation* yang ada pada PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020.

Kemudian dari kata kunci tersebut dicari korelasi antara pengertian dari indikator dari framework *effective digital transformation of e-government* yang ada pada disertasi Samantha Papavasiliou dengan PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020. Dari korelasi tadi akan muncul variabel dan indikator yang relevan dari disertasi Samantha Papavasiliou tadi yang sesuai dengan PERMENPAN No. 59 Tahun 2020 yang kemudian akan dibuat kuesioner. Untuk gambar mappingnya seperti pada Gambar 3.2- Gambar 3.3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Indikator SPBE	Nama Indikator	Sistem Fisik				Sistem Sosial				Sistem Kebijakan				Sistem Kognitif				Sistem Bisnis				Sistem Digital			
		Teknologi	Infrastruktur	Lokasi	Akses	Kultur	Masyarakat	Komunitas	Pasar	Kebijakan	Peraturan Perundang-undangan	Kepemimpinan	Pemerintah saat ini	Kesanggupan	Keysakinan	Pilihan Pribadi	Sikap	Inovasi	Ekonomi Berbagi	Industri	Sektor Swasta	Norma Sosial	SDM	Dukungan	Pilihan Pribadi
Indikator 1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	✓	✓						✓	✓		✓	✓				✓								
Indikator 2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	✓	✓						✓	✓		✓	✓				✓								
Indikator 3	Kebijakan Internal Manajemen Data	✓							✓			✓	✓										✓		
Indikator 4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	✓							✓			✓	✓										✓	✓	
Indikator 5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓												
Indikator 6	Kebijakan Internal Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		✓	✓	✓				✓			✓	✓												
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		✓	✓					✓			✓	✓										✓		
Indikator 8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	✓							✓			✓	✓										✓		
Indikator 9	Kebijakan Internal Audit TIK	✓	✓						✓			✓	✓										✓		
Indikator 10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah					✓	✓		✓			✓	✓				✓				✓	✓			
Indikator 11	Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat/Daerah	✓	✓						✓								✓								
Indikator 12	Peta Rencana SPBE pada Instansi Pusat/Daerah	✓	✓						✓																
Indikator 13	Keterpaduan Anggaran dan Rencana SPBE								✓													✓	✓		
Indikator 14	Inovasi Proses Bisnis SPBE												✓				✓								
Indikator 15	Pembangunan Aplikasi SPBE	✓											✓										✓	✓	
Indikator 16	Layanan Pusat Data	✓	✓	✓	✓																				
Indikator 17	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓																				
Indikator 18	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Daerah		✓	✓	✓																		✓		
Indikator 19	Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Daerah					✓	✓										✓					✓	✓		
Indikator 20	Kolaborasi Penerapan SPBE						✓						✓									✓	✓		
Indikator 21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE								✓			✓	✓										✓		
Indikator 22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	✓											✓										✓		
Indikator 23	Penerapan Manajemen Data	✓							✓			✓											✓		
Indikator 24	Penerapan Manajemen Aset TIK		✓						✓				✓												
Indikator 25	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia								✓				✓			✓	✓						✓		
Indikator 26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	✓							✓																
Indikator 27	Penerapan Manajemen Perubahan								✓				✓										✓		
Indikator 28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	✓							✓			✓											✓		
Indikator 29	Audit Infrastruktur SPBE								✓			✓		✓		✓							✓		
Indikator 30	Audit Aplikasi SPBE								✓			✓		✓		✓							✓		
Indikator 31	Audit Keamanan SPBE								✓			✓		✓		✓							✓		
Indikator 32	Layanan Perencanaan	✓																							
Indikator 33	Layanan Penganggaran	✓																							
Indikator 34	Layanan Keuangan	✓																							
Indikator 35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	✓																							
Indikator 36	Layanan Kepegawaian	✓																							
Indikator 37	Layanan Kearsipan	✓																							

Gambar 3. 4 Mapping Indikator Bagian 1

Untuk lebih jelasnya variabel dan indikator pada penelitian ini sesuai dengan gambar diatas ada pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator

Nama Variabel	Nama Indikator	Deskripsi
Sistem Fisik	Infrastruktur	Seluruh benda atau peralatan yang mendukung terbentuknya suatu sistem.
	Teknologi	Sebuah desain untuk membuat alat bantu tindakan dengan tujuan untuk mengurangi pekerjaan agar lebih mudah mencapai sebuah tujuan
	Lokasi	Sebuah tempat yang digunakan untuk menempatkan pusat data atau system
	Akses	Sebuah kegiatan interaksi dengan sistem
Sistem Sosial	Kultur	Budaya dari tempat yang akan diterapkan sebuah sistem
	Masyarakat	Kemampuan SDM dalam menciptakan <i>new value</i> melalui perkembangan teknologi
	Pasar	Kumpulan dari harga barang atau jasa yang ditawarkan di pasaran.
Sistem Kebijakan	Peraturan perundang-undangan	Peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara yang bersangkutan
	Kebijakan	Sebuah konsep serta asas yang dijadikan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan.
	Pemerintahan saat ini	Sebuah organisasi yang hak dan kewenangan dalam mengatur komunitas pada wilayah tertentu biasanya adalah sebuah negara

	Kepemimpinan	Kemampuan seseorang untuk memimpin orang lain, tim, atau seluruh organisasi.
Sistem Kognitif	Kesanggupan	Kesanggupan organisasi dalam menyiapkan atau melakukan hal yang diperlukan dalam pembuatan sistem.
	Sikap	Sebuah pernyataan atau tindakan dengan suatu objek, organisasi atau terhadap orang lain.
Sistem Bisnis	Inovasi	Kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penerapan praktis dari ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknologi
Sistem Digital	Norma Sosial	Aturan yang berada pada kelompok masyarakat yang diterapkan pada sosial
	Dukungan	Sebuah dukungan yang dibutuhkan agar system dapat diterapkan
	Sumber daya manusia	Seorang individu yang mempunyai kualitas untuk menggerakkan sebuah organisasi.

Populasi merupakan wilayah netral yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dapat disebut juga keseluruhan dari objek penelitian (Arikunto, 2006). Untuk populasi pada penelitian ini diperoleh dari jumlah karyawan dari DISKOMINFO Kota Surabaya dan DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto. Untuk rincian jumlah karyawan pada kedua DISKOMINFO tersebut ada pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 2 Informan Penelittian

No	Nama Instansi	Responden	Jumlah
1.	DISKOMINFO Kota Surabaya	Pegawai DISKOMINFO	192
2.	DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto	Pegawai DISKOMINFO	54
Jumlah			246

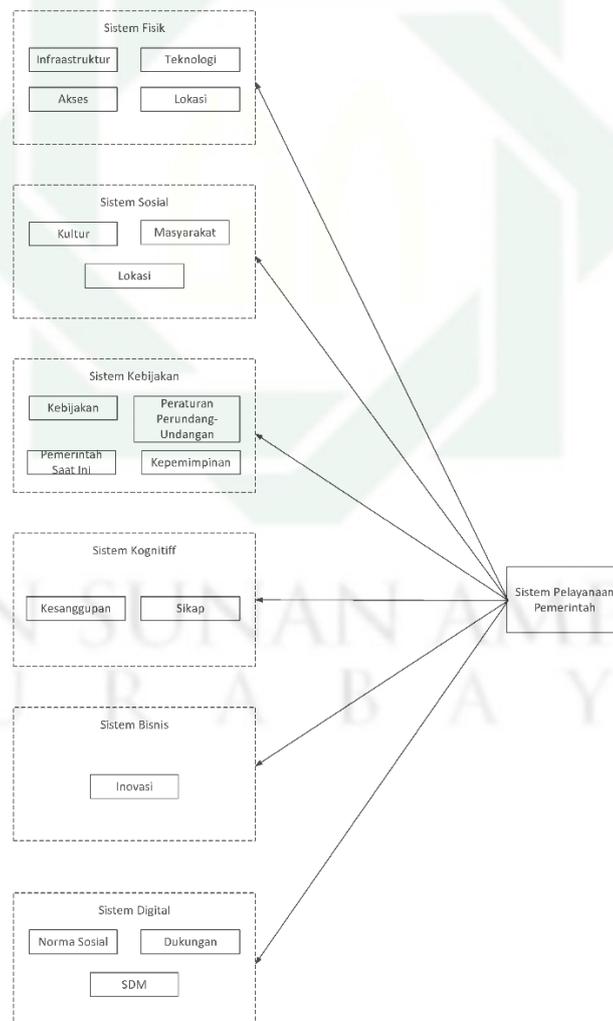
Total untuk jumlah karyawan pada DISKOMINFO pada dua daerah tersebut sesuai dengan tabel adalah 246. Dari populasi tersebut akan diambil sampel, sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi (Sugiyono, 2011). Untuk sampel dari populasi pada penelitian ini diambil dengan menggunakan minimal sampel untuk layak diteliti yaitu 30 orang (Fred N & Howard B 2000). Hal itu juga diperkuat pada dengan pernyataan Baley dalam penelitian Mahmud (2011) yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data serta statistik ukuran sampel minimal adalah 30.

Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi 2 jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan sebuah data yang akan diberikan langsung kepada peneliti atau orang yang mengumpulkan data sedangkan untuk data sekunder merupakan sebuah data yang diberikan kepada peneliti atau pengumpul data lewat sebuah media atau tidak langsung (Sugiyono,2017 p.193). Untuk data primer sendiri berasal dari penyebaran kuesioner dengan informan yang sudah dijelaskan di atas sedangkan untuk data sekunder pada penelitian ini berasal dari studi literatur yang berasal dari referensi penelitian dan penelitian terdahulu

3.1.6. Pembuatan Kuesioner

Pada tahap pembuatan kuesioner ini merupakan sebuah tahap pembuatan sebuah daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan langsung ditanggapi oleh informan atau responden. Tujuan dari kuesioner pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor performa pada penerapan SPBE di setiap objek penelitian. Untuk variabel dan indikator pada kuesioner ini dihasilkan dari proses mapping antara *Digital Service Provision System of System Framework* dengan PERMENPAN

No.59 Tahun 2020 yang berdasarkan PERMENPAN No. 59 Tahun 2020. Untuk mapping dilakukan dengan cara mencari pengertian dari indikator yang ada pada *Digital Service Provision System of System Framework* kemudian dihubungkan dengan indikator yang ada di PERMENPAN No. 59 Tahun 2020 dan dilihat kesamaan antara kedua indikator tersebut. Jika mempunyai kesamaan antara dua indikator tersebut maka indikator dari *Digital Service Provision System of System Framework* akan dipakai dan jika tidak maka indikator tersebut tidak dipakai. Untuk hasil mappingnya seperti pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 6 Hasil Mapping *Digital Service Provision System of System Framework* Dengan PERMENPAN No. 59 Tahun 2020 Berdasarkan PERMENPAN No. 59 Tahun 2020

Pada kuesioner ini dibuat dengan menggunakan sebuah referensi yang digunakan sebagai alat ukur yang digunakan dalam menentukan panjang pendeknya interval atau yang lebih dikenal dengan skala pengukuran. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang dipakai pada kuesioner ini adalah skala likert dengan tujuan untuk mengetahui persepsi dari pegawai DISKOMINFO yang terlibat pada penerapan SPBE di kota/kabupaten pada objek penelitian mengenai faktor performa pada penerapan SPBE.

Penggunaan skala likert biasanya untuk mengukur tanggapan, pendapat, persepsi dan sikap seseorang atau kelompok mengenai suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2016). Dengan penggunaan skala likert sebuah variabel pengukuran akan lebih dijelaskan menjadi beberapa indikator. Lalu dari indikator variabel tersebut digunakan untuk menyusun daftar instrumen yang bisa berupa pertanyaan atau pernyataan. Untuk Tanggapan dari setiap item instrumen pada skala likert mempunyai sebuah tingkatan mulai dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk lebih detailnya mengenai jawaban dari skala likert ada pada Tabel 3.3 yang ada dibawah ini.

Tabel 3. 3 Tabel Skala Likert

Pernyataan	Penilaian
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.1.7 Penyebaran Kuesioner

Tahapan ini adalah sebuah tahapan yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data dengan menyebar kuesioener. Tahap ini dilakukan setelah pembuatan kuesioner telah selesai. Penyebaran kuesioner ini disebarkan kepada

pegawai yang ada pada DISKOMINFO yang ada pada Kota Surabaya dan pada Kabupaten Mojokerto.

3.1.8 Uji Validitas

Uji validitas ditujukan untuk mengetahui seberapa besar keakuratan atau ketepatan sebuah alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jika suatu alat ukur mempunyai validitas yang tinggi maka alat ukur tersebut dapat memberikan hasil ukur yang sesuai dengan apa yang sedang diukur. Pengertian validitas itu sendiri adalah sebuah derajat yang berisi mengenai ketepatan antara data yang ada pada objek penelitian dan data yang ada pada laporan (Sugiyono, 2010). Maka dari itu data yang valid merupakan data yang sama pada objek penelitian dan data yang ada pada laporan (Sugiyono, 2010). Sebuah alat ukur atau kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada kuesioner itu mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh alat ukur tersebut (Ghozali, 2009).

Uji Validitas juga dapat dilakukan untuk menilai seberapa bagus atau seberapa baik instrumen penelitian, apakah sesuai dengan konsep yang digunakan dalam penelitian atau tidak. Uji validitas untuk kuesioner dibagi menjadi 2 yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor dapat diuji apabila instrumen dari pertanyaan yang diajukan menggunakan lebih dari satu faktor dan faktor tersebut mempunyai kesamaan antara faktor satu dengan faktor yang lain. Cara pengukurannya adalah dengan menghubungkan antara skor faktor dengan skor total faktor. Validitas item dapat diukur apabila ada suatu korelasi antara skor item dengan skor total item. Perhitungan validitas item dengan mengkorelasikan antara skor item dengan skor totalnya. Apabila alat uji menggunakan lebih dari satu faktor maka pengujian validitas item dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor (Sugiyono, 2013).

Untuk menguji validitas banyak teknik yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Pearson Product Moment atau istilah lainnya adalah korelasi Bivariate Pearson. Pada teknik analisis ini dengan cara mengkorelasikan skor item dari tiap tiap pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Skor total sendiri didapatkan dari penjumlahan dari keseluruhan pernyataan

atau pertanyaan. Apabila masing-masing item pertanyaan mampu mengungkap maksud dari penelitian tersebut maka hal item pernyataan atau pertanyaan tersebut dapat dianggap valid. Hal ini dapat dilihat dari jumlah r hitung dan r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel maka pernyataan atau pernyataan itu dapat dianggap valid. Berikut rumus korelasi bivariate atau pearson product moment ditunjukkan pada rumus 1.

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{N\sum x^2 - (\sum x)^2} (N\sum y^2 - \sum y^2)} \quad (1)$$

Keterangan

r = koefisien korelasi antara variabel bebas dan terikat

n = jumlah responden

x = skor tiap item

y = skor total variabel

3.1.9 Uji Reliabilitas

Setelah dilakukannya uji validitas diatas maka pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Reliabilitas itu sendiri mempunyai arti yaitu sebuah indeks yang menunjukkan seberapa besar keandalan atau kepercayaan sebuah alat ukur. Jika suatu alat ukur yang digunakan dalam mengukur konsep yang sama dengan hasil yang relatif konsisten maka alat ukur tersebut dapat dinyatakan reliabel. Reliabel itu sendiri juga mempunyai arti tingkat kepercayaan terhadap suatu pengukuran (Ghozali, 2009).

Uji reliabilitas sendiri adalah sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi alat ukur apabila melakukan pengujian dengan alat ukur yang sama lebih dari sekali terhadap suatu konsep yang sama (Sugiyono, 2011). Sebuah kuesioner dapat diartikan atau dikatakan reliabel apabila jawaban dari kuesioner tersebut stabil dan juga tetap tidak berubah-ubah. Sebuah pengukuran yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi maka data yang dihasilkan pula merupakan data yang reliable.

Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan metode dengan cara menghitung nilai alpha cronbach atau cronbach alpha. Dikarenakan pada penelitian

ini menggunakan alat ukur kuesioner yang mempunyai skala bertipe skala likert. Nilai cronbach alpha dimulai dari 0.00 hingga 1.00. Semakin besar nilai cronbach alpha (< 1) maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel. Metode cronbach alpha itu sendiri dikembangkan oleh Cronbach (1979). Untuk rumus cronbach alpha sebagaimana rumus 2 sebagai berikut (Besta, 2020).

$$R = \frac{k}{k-1} \left\{ 1 - \frac{\sum si}{st} \right\} \quad (2)$$

Keterangan:

r = nilai reliabilitas Alpha Cronbach

k = jumlah item

Si = varians skor tiap item

St = varians total

Untuk instrumen atau pertanyaan yang dimasukkan dalam uji reliabilitas ini adalah item item pertanyaan yang sudah valid. Sementara pertanyaan yang tidak valid tidak diikuti dalam uji reliabilitas ini. Untuk menentukan keterkaitan atau keeratan hubungan dari perhitungan reliabilitas ini jika hasil uji reliabilitas kurang dari < 0.2 maka hasil uji reliabilitas tersebut mempunyai hubungan yang sangat kecil. Apabila hasil uji reliabilitas antara 0.2- < 0.4 maka mempunyai hubungan yang sangat kecil, apabila hasil uji reliabilitas mempunya hasil antara 0.4- < 0.7 mempunyai hubungan yang cukup erat. Dan jika hasil uji reliabilitas tersebut lebih dari 0.7 dan kurang dari 1 maka mempunyai hubungan yang sangat erat (Sugiyono, 2018).

Dari kriteria diatas suatu alat ukur yang mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0.6 maka alat ukur tersebut dapat digunakan dalam penelitian (Darmawan, 2013). Jadi tingkat minimum suatu alat ukur dapat digunakan jika nilai cronbach alpha sendiri lebih dari > 0.6. Jika belum mencapai hal tersebut maka alat ukur tersebut akan mengalami revisi atau perubahan dan jika sudah sesuai maka data dari penelitian tersebut dapat dilanjutkan kedalam analisis data.

3.1.10 Komparasi Faktor-Faktor Performa

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada tahap ini akan membuat perbandingan atau komparasi mengenai faktor performa pada penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto dari jawaban responden yang sudah diuji validitas dan reliabilitas diatas. Komparasi ini menggunakan rata-rata jawaban responden Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto dari setiap pertanyaan mengenai faktor performa yang diajukan. Setelah mendapatkan rata-rata jawaban dari setiap pertanyaan maka akan dicari selisih atau gap dari setiap rata-rata jawaban dari setiap pertanyaan faktor performa. Tujuan dari komparasi ini adalah untuk mengetahui faktor mana saja yang unggul di Kota Surabaya dan faktor mana saja yang unggul di Kabupaten Mojokerto.

3.1.11 *Exploratory Factor Analysis (EFA)*.

Setelah melakukan komparasi faktor performa selanjutnya pada penelitian ini akan meringkas dan juga menentukan faktor performa yang dominan pada penerapan pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Untuk teknik yang dipakai dalam meringkas faktor tersebut menggunakan analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah analisis statistik yang menggunakan korelasi antar variabel (Nugroho, 2008). Selain itu, analisis faktor juga dapat mendapatkan sejumlah kecil data yang mempunyai keterkaitan dengan teknik yang digunakan yaitu teknik mereduksi data. Salah satu jenis dari analisis faktor adalah *Exploratory Factor Analysis (EFA)*.

Penggunaan EFA dari pada *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dikarenakan EFA digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel indikator yang digunakan kemudian membangun sebuah konstruk yang baru sedangkan CFA digunakan untuk menguji indikator yang sudah dikelompokkan berada dalam konstruksya (Sukemi & Trisnawati, 2021). EFA juga dapat digunakan jika teori mengenai jumlah faktor serta variabel mana saja yang terkait dengan faktor tertentu yang belum ada atau tidak diketahui dan jika ingin membuat suatu model yang baru sedangkan CFA biasanya digunakan pada peneliti yang mempunyai teori-teori dan ingin menguji teori tersebut (Gudono,2011).

EFA mempunyai tujuan untuk melakukan analisis terhadap sifat tertentu pada data penelitian. EFA juga merupakan statistik multivariat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jumlah terkecil dari konstruk yang dapat menjelaskan kovarians secara efisien (Watkins, 2018). EFA juga dapat digunakan untuk mereduksi atau meringkas data menjadi kumpulan yang lebih kecil dan untuk dapat menjelajahi sebuah struktur teoritis terhadap fenomena yang ada. Untuk tahapan dalam melakukan analisis faktor dibagi menjadi 4 tahapan yaitu (Emerson, 2017)

1. Menentukan Variabel yang akan dianalisis
2. Menghitung dan membuat matriks korelasi dengan menggunakan beberapa metode yaitu
 - a. *Barlett's Test of Sphericity*

Merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menguji bahwa variabel yang digunakan mempunyai korelasi. Jika hubungan antar variabel itu bernilai kecil maka variabel tersebut mempunyai peluang yang ada pada faktor yang berbeda (Norusis, 1986). Tujuan dilakukannya uji barlett yaitu untuk mengetahui bentuk matriks identitas. Rumus uji Bartlett Test of Sphericity yang digunakan adalah sebagai berikut (Nugroho, 2008):

$$\lambda_{obs}^2 = - \left[(N - 1) - \frac{(2p+5)}{6} \right] \ln |R| \quad (3)$$

Keterangan:

N = total observasi

|R| = determinan matriks korelasi

- b. Uji KMO

Uji *Kaiser Meyer Olkin* atau yang lebih dikenal dengan KMO digunakan untuk mengetahui kelayakan sampel dengan cara melakukan perbandingan antara koefisien parsial dengan koefisien korelasi sampel (Elpira, 2014). Untuk rumus uji KMO sendiri adalah

$$KMO = \frac{\sum \sum x = y r_{xy}^2}{\sum \sum x = y r_{xy}^2 + \sum \sum x = y a_{xy}^2} \quad (4)$$

$$x=1,2,\dots,p;y=1,2,\dots,p$$

Dimana:

r_{xy} = koefisien hubungan sederhana antara variabel x dan y.

a_{xy} = Koefisien hubungan parsial antara variabel x dan y.

Uji KMO dianggap layak jika hasilnya lebih dari $> 0,5$ sedangkan jika dibawahnya data dianggap tidak layak. Penilaian KMO didasarkan pada kriteria berikut:

- a. $KMO \leq 0,5$: tidak layak
- b. $0,5 < KMO \leq 0,6$: cukup
- c. $0,6 < KMO \leq 0,7$: lebih dari cukup
- d. $0,7 < KMO \leq 0,8$: agak baik
- e. $0,8 < KMO \leq 0,9$: baik
- f. $0,9 < KMO \leq 1,00$: sangat baik

Proses *factoring* atau ekstraksi yaitu sebuah proses reduksi data yang diperoleh dari penelitian dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit namun dapat menjelaskan korelasi antar indikator dalam penelitian.

3. Penentuan jumlah faktor berdasarkan besarnya jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor (eigen value) yang muncul. Faktor yang mempunyai nilai eigen value >1 adalah faktor yang dipilih
4. Rotasi faktor digunakan untuk menentukan letak dari suatu variabel ter-gabung dalam faktor mana. Faktor yang didapat pada umumnya tidak mudah diinterpretasikan sehingga perlu dilakukan rotasi pada matriks atau faktor pembobot untuk meningkatkan daya interpretasi (Nugroho, 2008).

3.1.10.1 Analisis Eigen Value

Analisis eigen value digunakan untuk menentukan faktor yang dominan pada penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Untuk faktor dominan pada kedua objek penelitian tersebut menggunakan nilai eigen value yang tertinggi yang berkorelasi dengan faktor yang sudah terbentuk.

3.1.10.2 Interpretasi Faktor

Interpretasi faktor atau penamaan faktor dengan cara dikelompokkan antara variabel yang mempunyai faktor loading yang tinggi dalam sebuah faktor yang terbentuk. Pemberian nama harus berdasarkan peubah yang memiliki dominasi faktor terbesar (Yong & Pearce, 2013).

3.1.12 Pembuatan Kesimpulan dan Penyusunan Laporan

Tahapan ini merupakan tahap terakhir pada penelitian ini yang berisi mengenai pembuatan kesimpulan yang diambil dari awal penelitian hingga akhir penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada diatas yang sudah disimpulkan. Kemudian setelah mendapatkan kesimpulan akan lanjut dengan membuat laporan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

3.2 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah penggalan data untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan topik yang diangkat sebagai penelitian. Pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan mencari, mengumpulkan serta mencatat semua secara objektif sesuai dengan hasil di lapangan. Disini pencatatan yang dimaksud ini adalah pencatatan berbagai bentuk data yang ada di lapangan (Sugiyono, 2010, p.388). Data yang dikumpulkan dapat melalui berbagai macam metode seperti kualitatif, kuantitatif dan gabungan (mixed method). Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode yang dilakukan pada saat penelitian untuk meneliti sebuah objek alamiah serta berlandaskan pada filsafat postpositivisme (kebenaran) atau interpretatif (pendapat atau pandangan) (Sugiyono, 2013). Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang meneliti sebuah populasi atau sampel tertentu berlandaskan pada filsafat positivisme (kebenaran) (Sugiyono,2013).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor performa pada penerapan SPBE di Jawa Timur dengan objek penelitian pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian

kuantitatif. Dimana penelitian ini untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Sementara itu untuk analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis faktor EFA dimana dengan analisis faktor dapat merangking atau mengurutkan faktor apa yang paling signifikan yang mempengaruhi

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang berjudul analisis komparasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi performa penerapan SPBE di Jawa Timur. Penelitian ini akan dilaksanakan di DISKOMINFO Kota Surabaya dan DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2022 hingga April 2022.



BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menampilkan serta menjelaskan mengenai proses pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah. Untuk data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada responden. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian, penyebaran kuesioner, uji validitas, uji reliabilitas, faktor performa pada Kota Surabaya, faktor performa pada Kabupaten Mojokerto, komparasi faktor performa dan faktor dominan pada Provinsi Jawa Timur.

4.1 Instrumen Penelitian

Pada instrumen ini dijadikan sebagai alat untuk mencari data terkait faktor performa penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Pembuatan instrumen ini berdasarkan hasil mapping pada bab 3 diatas yang terdiri dari *physical system*, *social system*, *policy system*, *cognitive system*, *business system* dan *digital system*. Untuk instrumen penelitian yang dimaksud adalah berupa kuesioner seperti pada Tabel 4.1 yang ada di bawah ini.

Tabel 4. 1 Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	No	Pernyataan
Sistem Fisik	Teknologi	1	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien penggunaan teknologi sangat diperlukan
		2	Menurut saya keberadaan teknologi sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi SPBE di instansi
	Infrastruktur	1	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien harus didukung dengan infrastruktur yang memadai
		2	Menurut saya adanya infrastruktur yang memadai sangat mempengaruhi dalam kesuksesan implementasi SPBE di instansi
	Lokasi	1	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien lokasi dan kondisi server sangat diperlukan

		2	Menurut saya kondisi serta lokasi server sangat mempengaruhi dalam kesuksesan penerapan SPBE di instansi
	Akses	1	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien harus ada pembatasan akses menuju server
		2	Menurut saya akses server yang terbatas sangat berpengaruh dalam kesuksesan penerapan SPBE di instansi
Sistem Sosial	Kultur	1	Menurut saya kultur kebebasan berpendapat dan transparansi informasi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SPBE dalam instansi pemerintahan.
		2	Menurut saya kultur pemerintahan yang sekarang mesti banyak diubah untuk menuju implementasi SPBE yang optimal.
	Masyarakat	1.	Menurut saya untuk mengukur kesuksesan implementasi SPBE di instansi sangat memerlukan feedback dari masyarakat sebagai pengguna SPBE
		2.	Menurut saya feedback dari masyarakat sangat berpengaruh dalam kesuksesan implementasi SPBE yang optimal
	Pasar	1.	Menurut saya untuk menerapkan SPBE sangat memerlukan untuk mengetahui harga pasar dari hardware software dan jasa yang diperlukan
		2.	Menurut saya harga pasar hardware, software maupun jasa yang diperlukan dalam penerapan SPBE sangat berpengaruh dalam kesuksesan implementasi SPBE
Sistem Kebijakan	Kebijakan	1.	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang optimal harus sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah mengenai SPBE
		2.	Menurut saya kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah mengenai SPBE sangat berpengaruh terhadap implementasi SPBE
	Peraturan Perundang-undangan	1.	Menurut saya dalam implementasi SPBE yang efektif dan efisien sangat memerlukan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan
		2.	Menurut saya peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh terhadap implementasi SPBE di instansi
	Kepemimpinan	1.	Menurut saya dalam penerapan SPBE sangat memerlukan kecocokan antara gaya kepemimpinan ketua tim koordinasi SPBE dengan anggota yang dipimpin

		2.	Menurut saya gaya kepemimpinan seorang ketua dalam instansi akan mempengaruhi efektivitas implementasi SPBE di instansi
	Pemerintah Saat Ini	1.	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien sangat memerlukan peran dari pemerintah
		2.	Menurut saya peran pemerintah terhadap implementasi SPBE sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi SPBE di instansi
Sistem Kognitif	Kesanggupan	1.	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien sangat memerlukan kesanggupan dari setiap anggota dari tim koordinasi pelaksanaan SPBE untuk melaksanakan tugas yang diberikan
		2.	Menurut saya kesanggupan dari setiap anggota dari tim koordinasi pelaksanaan SPBE mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan implementasi SPBE di instansi
	Sikap	1.	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien sangat bergantung pada sikap dari anggota tim koordinasi pelaksanaan SPBE terhadap tugas yang diberikan
		2.	Menurut saya sikap dari anggota tim koordinasi pelaksanaan SPBE sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi SPBE tugas yang diberikan
Sistem Bisnis	Inovasi	1.	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien sangat memerlukan inovasi terhadap proses bisnis baru atau yang sudah ada pada instansi
		2.	Menurut saya inovasi terhadap proses bisnis pada instansi mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan implementasi SPBE di instansi
Sistem Digital	Norma Sosial	1.	Menurut saya untuk menerapkan SPBE sangat memerlukan norma sosial antar anggota tim koordinasi pelaksanaan SPBE
		2.	Menurut saya norma sosial antar anggota tim koordinasi pelaksanaan SPBE sangat mempengaruhi dalam implementasi SPBE di instansi
	SDM	1.	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien sangat memerlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
		2.	Menurut saya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi SPBE di instansi
	Dukungan	1.	Menurut saya untuk dalam, perawatan SPBE sangat memerlukan evaluasi atau update pada sistem mulai dari komputer, software

			hingga sistem jaringan secara berkala.
		2.	Menurut saya evaluasi atau update pada sistem mulai dari komputer, software hingga sistem jaringan secara berkala sangat berpengaruh dalam kesuksesan implementasi SPBE di instansi

4.2. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran dan pengisian kuesioner ditujukan kepada penanggung jawab pelaksanaan SPBE yaitu pada DISKOMINFO kabupaten atau kota. Untuk objek penelitian ini dilakukan adalah pada DISKOMINFO Kota Surabaya dan DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto. Untuk kuesioner yang disebar peneliti menggunakan metode kertas. Dan untuk bentuk kuesionernya seperti pada Gambar 4.1 berikut

KUESIONER PENELITIAN

Saya Anggito Hernando dengan NIM H7621802. Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya dengan judul Analisis Komparasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Performa Penerapan SPBE di Jawa Timur. Oleh karena itu diperlukan dukungan Bapak/Ibu, Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini dengan jujur. Semua informasi yang diberikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu, Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini. Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda centang atau silang pada kotak yang tersedia di bawah ini!

Identitas Responden

Nama : ANGGITO HERNANDO
 Usia : 27
 Jenis Kelamin : L

A. Kuesioner Faktor Teknologi

NO	PERNYATAAN	STS	TS	RR	S	SS
1	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien penggunaan teknologi sangat diperlukan					✓
2	Menurut saya keberadaan teknologi sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi SPBE di instansi					✓

B. Kuesioner Faktor Infrastruktur

NO	PERNYATAAN	STS	TS	RR	S	SS
1	Menurut saya untuk menerapkan SPBE yang efektif dan efisien harus didukung dengan infrastruktur yang memadai					✓
2	Menurut saya adanya infrastruktur yang memadai sangat mempengaruhi dalam kesuksesan implementasi SPBE di instansi					✓

C. Kuesioner Faktor Lokasi

NO	PERNYATAAN	STS	TS	RR	S	SS

Gambar 4. 1 Gambar Kuesioner

Untuk nama sengaja di blur sesuai dengan permintaan responden dikarenakan menyangkut privasi. Sedangkan untuk bukti responden penelitian yang mengisi kuesioner ini salah satunya yaitu Bapak Darajat Noor Abidin S.kom salah satu pegawai dari DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto dan salah satu pegawai dari DISKOMINFO Kota Surabaya yaitu Ibu Erina Khoirunnisa S.IAN. Dan untuk bukti dokumentasi lainnya ada pada lampiran berikut beberapa foto dokumentasi seperti pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Foto Responden Kabupaten Mojokerto



Gambar 4. 3 Foto Responden Kota Surabaya

4.3 Deskripsi Data Sebaran

Setelah dilakukannya penyebaran kuesioner yang berupa kertas didapatkan total 60 responden yang terdiri dari 30 responden dari Kota Surabaya dan 30 responden dari Kabupaten Mojokerto. Untuk karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin untuk Kota Surabaya seperti pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	17	57%
Perempuan	13	43%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dari Kota Surabaya berdasarkan jenis kelamin laki-laki ada 17 orang dan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan 13 orang sehingga presentase dari responden Kota Surabaya yang berjenis kelamin laki-laki adalah 57% dan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan adalah 43 %. Untuk lebih jelasnya ada pada gambar grafik seperti pada Gambar 4.4 berikut.



Gambar 4. 4 Karakteristik Responden Kota Surabaya

Sedangkan untuk karakteristik responden pada Kabupaten Mojokerto berdasarkan jenis kelamin seperti pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	19	63%
Perempuan	11	37%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dari Kabupaten Mojokerto berdasarkan jenis kelamin laki-laki ada 19 orang dan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan 13 orang sehingga presentase dari responden Kabupaten Mojokerto yang berjenis kelamin laki-laki adalah 63% dan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan adalah 37 %. Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik responden Kabupaten Mojokerto ada pada gambar grafik seperti pada Gambar 4.5 berikut.



Gambar 4. 5 Karakteristik Responden Kabupaten Mojokerto

Jadi berdasarkan dua tabel dan dua gambar grafik diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	35	58%
Perempuan	25	42%

Jadi dari tabel diatas untuk karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penellitian ini memiliki total responden laki-laki sebanyak 35 orang dari Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto serta untuk responden yang berjenis kelamin perempuan memiliki total responden 25 orang dan untuk presentase responden laki-laki adalah sebesar 58% dari 100% dan untuk responden perempuan pada penelitian ini memiliki presentase sebesar 42% dari 100%. Untuk lebih jelasnya ada pada gambar grafik pada Gambar 4.6 berikut.



Gambar 4. 6 Karakteristik Seluruh Responden

4.4 Uji Validitas

Setelah penyebaran kuesioner dan didapatkan data sebelum dianalisis akan diuji validitas terlebih dahulu untuk menguji kevalidan instrumen yang sudah disebarkan. Untuk pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment. Teknik ini menggunakan perbandingan antara nilai r hitung dan r tabel. Dimana r tabel dapat dicari dengan rumus $df = n-2$ dengan signifikansi 0.05 atau 5% dimana n adalah jumlah responden. Maka n pada pada penelitian ini adalah $60-2 = 58$. Yang berarti r -tabel pada penelitian ini adalah sebesar 0.2542. Sedangkan r tabel dihasilkan dari korelasi Pearson Product Moment pada setiap pertanyaan. Pada penelitian ini untuk uji validitas menggunakan bantuan software SPSS dengan versi 2.6.

Oleh karena itu apabila r hitung $>$ dari pada 0.2542 maka pertanyaan tersebut dianggap valid sebaliknya jika r hitung $<$ 0.2542 maka pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Untuk hasil korelasi pearson product moment ada pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Korelasi Pearson Product Momen

Indikator	Hasil Uji	Sub_Total
Teknologi 1	Pearson Correlation	.128
	Sig. (2-tailed)	0.331
	N	60
Teknologi 2	Pearson Correlation	.481**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Infrastruktur 1	Pearson Correlation	.367**
	Sig. (2-tailed)	0.004
	N	60
Infrastruktur 2	Pearson Correlation	.531**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Lokasi 1	Pearson Correlation	.472**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Lokasi 2	Pearson Correlation	.558**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Akses 1	Pearson Correlation	.432**
	Sig. (2-tailed)	0.001
	N	60
Akses 2	Pearson Correlation	.495**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Kultur 1	Pearson Correlation	.663**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Kultur 2	Pearson Correlation	.515**

	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Masyarakat 1	Pearson Correlation	.654**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Masyarakat 2	Pearson Correlation	.589**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Pasar 1	Pearson Correlation	.492**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Pasar 2	Pearson Correlation	.451**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Kebijakan 1	Pearson Correlation	.407**
	Sig. (2-tailed)	0.001
	N	60
Kebijakan 2	Pearson Correlation	.507**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Peraturan Perundang Undangan 1	Pearson Correlation	.345**
	Sig. (2-tailed)	0.007
	N	60
Peraturan Perundang Undangan 2	Pearson Correlation	.550**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Kepemimpinan 1	Pearson Correlation	.445**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Kepemimpinan 2	Pearson Correlation	.404**
	Sig. (2-tailed)	0.001
	N	60
Pemerintah Saat Ini 1	Pearson Correlation	.400**
	Sig. (2-tailed)	0.002
	N	60

Pemerintah Saat Ini 2	Pearson Correlation	.300*
	Sig. (2-tailed)	0.020
	N	60
Kesanggupan 1	Pearson Correlation	.380**
	Sig. (2-tailed)	0.003
	N	60
Kesanggupan 2	Pearson Correlation	.332**
	Sig. (2-tailed)	0.010
	N	60
Sikap 1	Pearson Correlation	.445**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Sikap 2	Pearson Correlation	.529**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Inovasi 1	Pearson Correlation	.295*
	Sig. (2-tailed)	0.022
	N	60
Inovasi 2	Pearson Correlation	.265*
	Sig. (2-tailed)	0.040
	N	60
Norma Sosial 1	Pearson Correlation	.497**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Norma Sosial 2	Pearson Correlation	.487**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Sumber Daya Manusia 1	Pearson Correlation	.326*
	Sig. (2-tailed)	0.011
	N	60
Sumber Daya Manusia 2	Pearson Correlation	.445**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Dukungan 1	Pearson Correlation	.386**
	Sig. (2-tailed)	0.002
	N	60

Dukungan 2	Pearson Correlation	.482**
	Sig. (2-tailed)	0.000
	N	60
Sub_Total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	60

Dari tabel diatas maka instrumen yang r hitungnya kurang dari r tabel (0.2542) dan dinyatakan tidak valid adalah hanya pertanyaan pada indikator teknologi 1. Oleh karena itu pertanyaan pada indikator teknologi 1 di *drop out* atau dibuang dan tidak diikutkan dalam proses analisis data.

4.5 Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji valid sebelumnya langkah selanjutnya pada penelitian ini adalah menguji reliabilitas pada instrumen penelitian. Tujuan uji reliabilitas pada penelitian ini untuk mengetahui bahwa alat ukur sudah bersifat reliabel atau konsisten (Sugiyono, 2017). Untuk uji reliabilitas ini data yang tidak valid tidak diikutkan. Dan juga untuk pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan software SPSS for Windows versi 2.6. Suatu alat ukur memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0.6 maka alat ukur tersebut dapat digunakan dalam penelitian (Darmawan, 2013).

Untuk hasil uji reliabilitas pada variabel sistem fisik yang terdiri dari 4 faktor yaitu faktor teknologi, infrastruktur, lokasi dan akses. Untuk hasil ujinya pada penelitian ini seperti pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Fisik

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.782	7

Dari Tabel 4.6 diatas bahwa untuk seluruh pertanyaan pada variabel system fisik memiliki nilai sebesar 0.782 dan lebih dari 0.6. Jadi untuk pertanyaan pada

variabel system fisik sudah lulus uji reliabilitas dan dapat dinyatakan reliabel. Untuk variabel sistem sosial yang terdiri dari faktor kultur, masyarakat dan pasar mempunyai hasil uji reliabilitas sesuai dengan Tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Sosial

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.798	6

Dari Tabel 4.7 diatas bahwa untuk seluruh pertanyaan pada variabel sistem sosial memiliki nilai sebesar 0.798 yang berarti lebih dari 0.6. Jadi untuk pertanyaan pada variabel sistem sosial sudah lulus uji reliabilitas dan dapat dinyatakan reliabel. Untuk variabel selanjutnya yaitu variabel sistem kebijakan yang terdiri dari faktor kebijakan, pemerintahan saat ini, peraturan perundang-undangan dan kepemimpinan mempunyai hasil uji reliabilitas sesuai dengan Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Kebijakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.734	8

Dari Tabel 4.8 diatas bahwa untuk seluruh pertanyaan pada variabel system kebijakan memiliki nilai sebesar 0.734 dan lebih dari 0.6. Jadi untuk pertanyaan pada variabel sistem kebijakan sudah lulus uji reliabilitas dan dapat dinyatakan reliabel. Untuk variabel selanjutnya adalah variabel sistem kognitif yang terdiri dari faktor kesanggupan dan sikap mempunyai hasil uji reliabilitas sesuai dengan Tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Kognitif

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.659	4

Dari Tabel 4.9 diatas bahwa untuk seluruh pertanyaan pada variabel sistem kognitif memiliki nilai sebesar 0.659 yang berarti lebih dari 0.6. Jadi untuk pertanyaan pada variabel sistem kognitif sudah lulus uji reliabilitas dan dapat dinyatakan reliabel. Untuk variabel selanjutnya adalah variabel sistem bisnis yang terdiri dari faktor inovasi mempunyai hasil uji reliabilitas sesuai dengan Tabel 4.10 sebagai berikut.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Bisnis

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.728	2

Dari Tabel 4.6 diatas bahwa untuk seluruh pertanyaan pada variabel sistem bisnis memiliki nilai sebesar 0.728 yang berarti uji reliabilitas pada variabel system bisnis ini memiliki hasil yang lebih dari 0.6. Jadi untuk pertanyaan pada variabel sistem bisnis sudah lulus uji reliabilitas dan dapat dinyatakan reliabel. Untuk variabel yang terakhir yaitu variabel sistem digital yang terdiri dari faktor norma sosial, Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan mempunyai hasil uji reliabilitas sesuai dengan Tabel 4.11 sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Digital

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.625	6

Dari Tabel 4.11 diatas bahwa untuk seluruh pertanyaan pada variabel sistem digital memiliki nilai sebesar 0.625 yang berarti memiliki nilai yang lebih dari 0.6. Jadi untuk pertanyaan pada variabel digital system sudah lulus uji reliabilitas dan dapat dinyatakan reliabel. Dari uji reliabilitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pertanyaan pada setiap variabel sudah lolos uji reliabilitas dan dapat dinyatakan reliabel.

4.6 Komparasi Faktor Performa

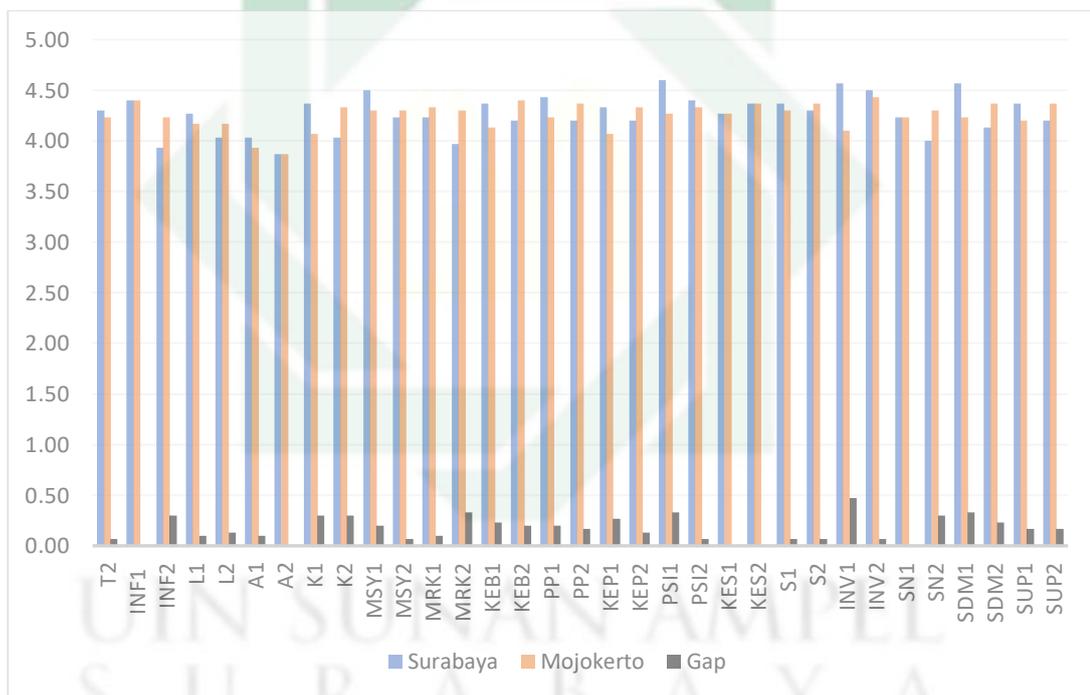
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas selanjutnya akan dilakukan komparasi jawaban mengenai faktor performa pada penerapan SPBE antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Untuk hasil komparasi jawaban seperti pada Tabel 4.12 sebagai berikut.

Tabel 4. 12 Komparasi Jawaban Faktor Performa

Nama Faktor	Kota Surabaya	Kab. Mojokerto	Gap
T2 (Teknologi 2)	4.30	4.23	0.07
INF1 (Infrastruktur 1)	4.40	4.40	0.00
INF2 (Infrastruktur 2)	3.93	4.23	0.30
L1 (Lokasi 1)	4.27	4.17	0.10
L2 (Lokasi 2)	4.03	4.17	0.13
A1 (Akses 1)	4.03	3.93	0.10
A2 (Akses 2)	3.87	3.87	0.00
K1 (Kultur 1)	4.37	4.07	0.30
K2 (Kultur 2)	4.03	4.33	0.30
MSY1 (Masyarakat 1)	4.50	4.30	0.20
MSY 2 (Masyrakat 2)	4.23	4.30	0.07
MRK1 (Pasar 1)	4.23	4.33	0.10
MRK2 (Pasar 2)	3.97	4.30	0.33
KEB1 (Kebijakan 1)	4.37	4.13	0.23
KEB2 (Kebijakan 2)	4.20	4.40	0.20
PP1 (Peraturan Perundangan Undangan 1)	4.43	4.23	0.20
PP2 (Peraturan Perundang Undangan 2)	4.20	4.37	0.17
KEP1 (Kepemimpinan 1)	4.33	4.07	0.27
KEP2 (Kepemimpinan 2)	4.20	4.33	0.13
PSI1 (Pemerintah Saat Ini 1)	4.60	4.27	0.33
PSI2 (Pemerintah Saat Ini 2)	4.40	4.33	0.07
KES1 (Kesanggupan 1)	4.27	4.27	0.00
KES2 (Kesanggupan 2)	4.37	4.37	0.00
S1 (Sikap 1)	4.37	4.30	0.07

S2 (Sikap 2)	4.30	4.37	0.07
INV1 (Inovasi 1)	4.57	4.10	0.47
INV2 (Inovasi 2)	4.50	4.43	0.07
SN1 (Norma Sosial 1)	4.23	4.23	0.00
SN2 (Norma Sosial 2)	4.00	4.30	0.30
SDM 1 (Sumber Daya Manusia 1)	4.57	4.23	0.33
SDM2 (Sumber Daya Manusia 2)	4.13	4.37	0.23
SUP1 (Dukungan 1)	4.37	4.20	0.17
SUP2 (Dukungan 2)	4.20	4.37	0.17

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan jawaban mengenai komparasi faktor performa penerapan SPBE di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto dapat dilihat diagramnya seperti Gambar 4.7 sebagai berikut.

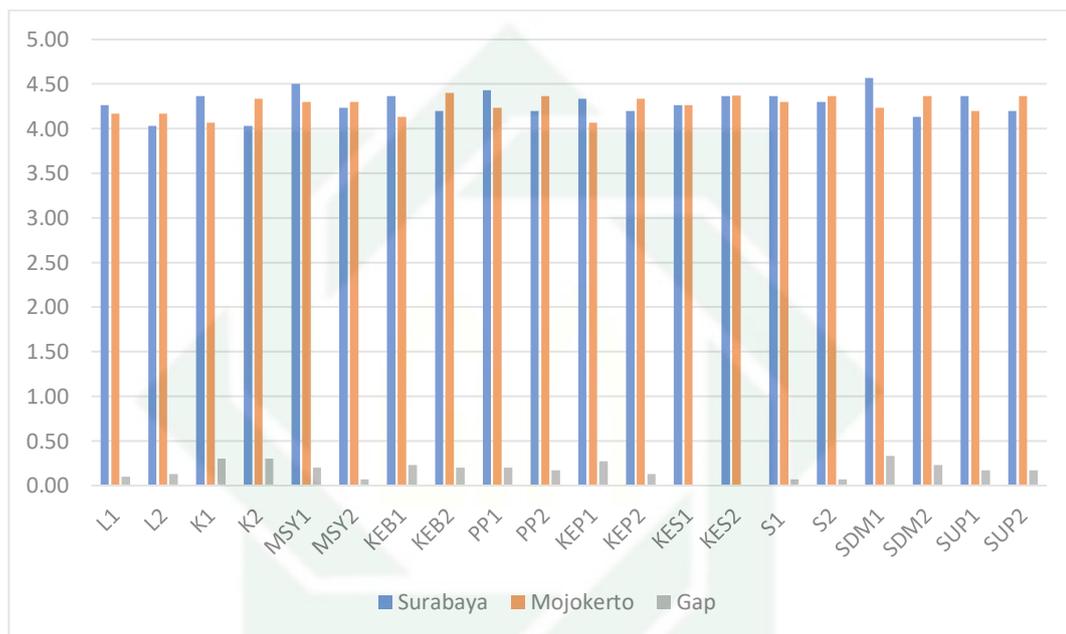


Gambar 4. 7 Diagram Komparasi Faktor Performa

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto mempunyai faktor performa yang relatif sama namun jika diperbesar atau dilihat lebih spesifik ke dalam lagi antara Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto memiliki karakteristik faktor performa yang berbeda dan juga gap atau selisih antara faktor performa antara Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto kurang dari 0.5. Dikatakan mempunyai faktor performa yang relative sama dikarenakan pada jawaban dalam satu faktor performa terkadang lebih tinggi Kota

Surabaya namun kadang juga lebih tinggi Kota Mojokerto dan ada juga yang mempunyai rata-rata yang sama.

Hal itu seperti pada faktor performa kultur dimana kultur 1 lebih tinggi Kota Surabaya dan pada kultur 2 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto. Untuk lebih lengkapnya mengenai faktor performa yang mempunyai kesamaan ada pada Gambar 4.8 sebagai berikut.



Gambar 4. 8 Faktor Performa Yang Mempunyai Kesamaan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa ada 10 faktor performa yang mempunyai kesamaan pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Untuk faktor pertama adalah faktor lokasi dimana pada lokasi 1 lebih tinggi Kota Surabaya dengan gap atau selisih sebesar 0.10. Sedangkan pada lokasi 2 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto dengan gap 0.13. Untuk faktor kedua adalah faktor kultur dimana pada kuultur 1 lebih tinggi Kota Surabaya dengan gap atau selisih sebesar 0.30. Sedangkan pada kultur 2 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto dengan gap yang sama juga yaitu 0.30.

Untuk faktor ketiga adalah faktor masyarakat dimana pada masyarakat 1 lebih tinggi Kota Surabaya dengan gap atau selisih sebesar 0.20. Sedangkan pada masyarakat 2 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto dengan gap 0.07. Untuk faktor keempat adalah faktor kebijakan dimana pada kebijakan 1 lebih tinggi Kota

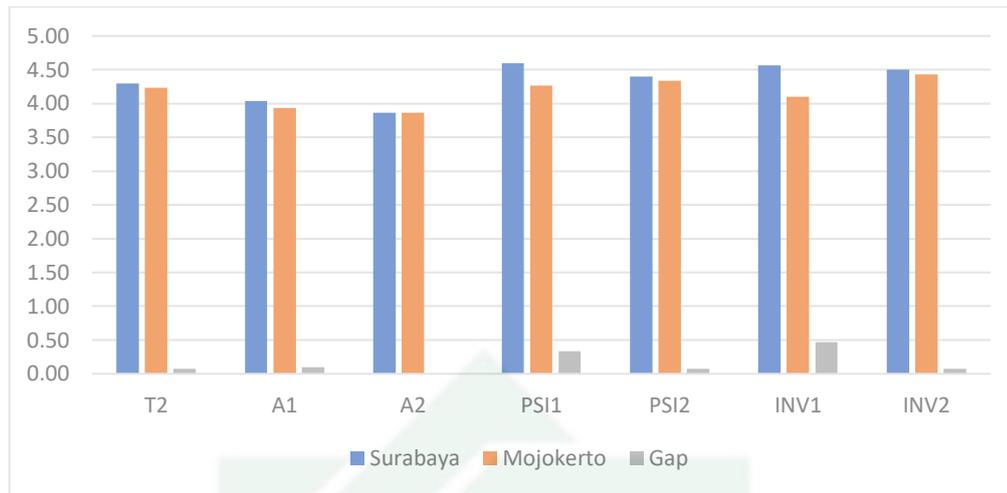
Surabaya dengan gap atau selisih sebesar 0.23. Sedangkan pada kebijakan 2 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto dengan gap 0.20.

Untuk faktor kelima adalah faktor peraturan perundang-undangan dimana pada peraturan perundang-undangan 1 lebih tinggi Kota Surabaya dengan gap atau selisih sebesar 0.20. Sedangkan pada peraturan perundang-undangan 2 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto dengan gap 0.17. Untuk faktor keenam adalah faktor kepemimpinan dimana pada kepemimpinan 1 lebih tinggi Kota Surabaya dengan gap atau selisih sebesar 0.27. Sedangkan pada kepemimpinan 2 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto dengan gap 0.13.

Untuk faktor ketujuh adalah faktor kesanggupan dimana pada kesanggupan 1 tidak memiliki gap antara Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto dikarenakan memiliki nilai rata-rata yang sama. Sedangkan pada kesanggupan 2 juga tidak memiliki gap antara Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto dikarenakan memiliki nilai rata-rata yang sama. Untuk faktor kedelapan adalah faktor sikap dimana pada sikap 1 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto dengan gap atau selisih sebesar 0.07. Sedangkan pada sikap 2 lebih tinggi Kota Surabaya dengan gap yang sama juga sebesar 0.07.

Untuk faktor kesembilan adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dimana pada SDM 1 lebih tinggi Kota Surabaya dengan gap atau selisih sebesar 0.33. Sedangkan pada SDM 2 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto dengan gap 0.23. Untuk faktor kesepuluh atau yang terakhir adalah faktor dukungan dimana pada dukungan 1 lebih tinggi Kota Surabaya dengan gap atau selisih sebesar 0.17. Sedangkan pada dukungan 2 lebih tinggi Kabupaten Mojokerto dengan gap yang sama yaitu 0.17.

Untuk karakteristik faktor performa pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto mempunyai perbedaan dimana perbedaan itu membuat Kota Surabaya dominan pada beberapa faktor dan juga Kabupaten Mojokerto yang dominan juga dalam beberapa faktor. Pada karakteristik faktor performa yang dominan pada Kota Surabaya ada pada Gambar 4.9 sebagai berikut.

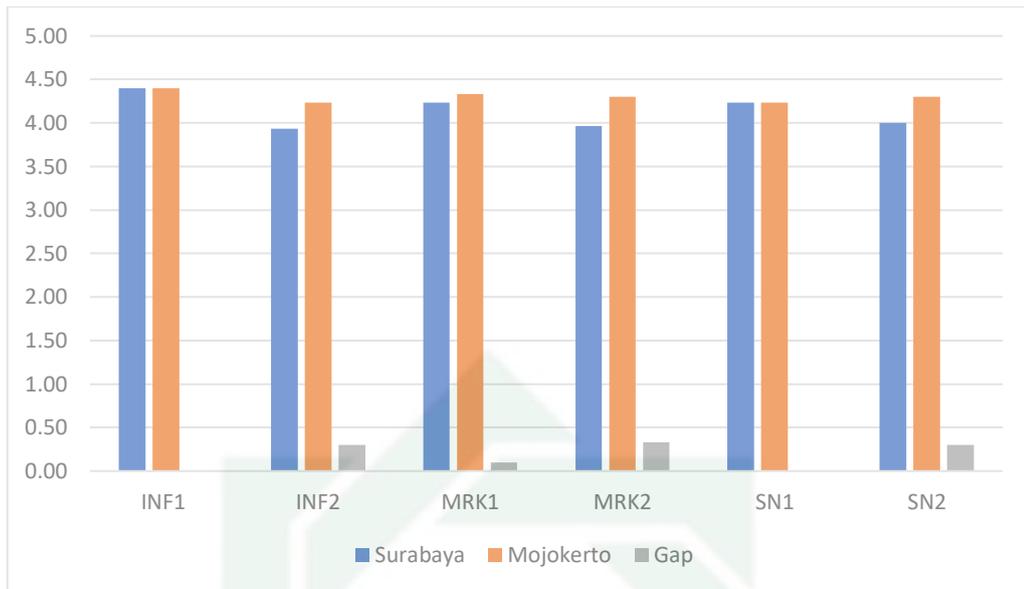


Gambar 4. 9 Faktor Dominan Pada Kota Surabaya

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa karakteristik faktor performa pada Kota Surabaya ada 4 faktor. Dimana pada faktor pertama adalah faktor teknologi dimana untuk gap atau selisih sebesar 0.07 lebih tinggi dari pada Kabupaten Mojokerto. Untuk karakteristik faktor performa yang kedua pada Kota Surabaya adalah faktor akses dimana untuk akses 1 mempunyai gap sebesar 0.10 lebih tinggi dari pada Kabupaten Mojokerto. Sedangkan pada akses 2 tidak ada gap karena rata-rata pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto sama.

Untuk karakteristik faktor performa yang ketiga pada Kota Surabaya adalah faktor pemerintah saat ini dimana untuk pemerintah saat ini 1 mempunyai gap sebesar 0.33 lebih tinggi dari pada Kabupaten Mojokerto. Sedangkan pada pemerintah saat ini 2 mempunyai 0.07 lebih tinggi dari pada Kabupaten Mojokerto dan karakteristik faktor performa yang terakhir atau keempat adalah inovasi dimana untuk inovasi 1 mempunyai gap sebesar 0.47 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mojokerto. Sekaligus gap pada inovasi 1 ini merupakan gap tertinggi pada penelitian ini. Untuk inpvasi 2 mempunyai gap sebesar 0.07 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mojokerto.

Untuk Kabupaten Mojokerto sendiri juga memiliki beberapa karakteristik faktor performa pada penerapan SPBE. Untuk karakteristik faktor performa yang ada pada Kabupaten Mojokerto ada pada Gambar 4.10 berikut.



Gambar 4. 10 Faktor Dominan Pada Kabupaten Mojokerto

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa karakteristik faktor performa pada Kabupaten Mojokerto ada 3 faktor. Dimana pada karakteristik faktor pertama adalah faktor infrastruktur dimana untuk infrastruktur 1 tidak memiliki gap atau selisih diakrenakan rata-rata sama antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk infrastruktur 2 mempunyai gap atau selisih sebesar 0.30 lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Surabaya Untuk karakteristik faktor performa yang kedua pada Kabupaten Mojokerto adalah faktor pasar dimana untuk pasar 1 mempunyai gap sebesar 0.10 lebih tinggi dari pada Kota Surabaya. Sedangkan pada pasar 2 memiliki gap sebesar 0.33 lebih tinggi dari pada Kota Surabaya.

Untuk karakteristik faktor performa yang ketiga atau yang terakhir pada Kabupaten Mojokerto adalah faktor norma sosial dimana untuk norma sosial 1 tidak memiliki gap atau selisih diakrenakan rata-rata sama antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Sedangkan pada norma sosial 2 mempunyai gap 0.30 lebih tinggi dari pada Kota Surabaya.

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto mempunyai 10 faktor yang sama serta pada Kota Surabaya mempunyai 4 karakteristik faktor performa dan Pada Kabupaten Mojokerto mempunyai 3 karakteristik faktor performa. Dan juga gap atau selisih pada faktor performa memiliki nilai yang kecil. Rata-rata gap atau selisih dari setiap faktor

performa adalah < 0.05 dan bahkan ada beberapa faktor performa yang tidak mempunyai gap dikarenakan pada faktor tersebut mempunyai rata-rata nilai yang sama.

4.7 Exploratory Factor Analysis (EFA).

Setelah mengetahui komparasi faktor performa pada Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya pada bab ini akan menjelaskan mengenai faktor dominan pada penerapan SPBE di dua daerah tersebut. Untuk mencari faktor dominan dilakukan dengan menggunakan metode analisis faktor EFA dengan menggunakan software SPSS for Windows versi 2.6. Untuk data menggunakan gabungan data dari rata-rata jawaban dari setiap faktor pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Untuk hasil uji KMO dan Bartlett's Test ada pada tabel 4.13 berikut.

Tabel 4. 13 Hasil KMO dan Bartlett's Test Provinsi Jawa Timur

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.643
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	507.675
	df	136
	Sig.	.000

Dari Tabel 4.13 diatas diketahui nilai dari KMO MSA sebesar 0.643 dimana lebih dari 0.50 dan juga nilai dari Bartlett's Test of Sphericity (Sig) sebesar $0.00 < 0.05$ yang berarti analisis faktor dapat dilanjutkan dikarenakan sudah memenuhi persyaratan. Kemudian untuk nilai estimasi dari communalities yang digunakan untuk menjelaskan mengenai jumlah variansi yang dapat dijelaskan oleh faktor yang ada. Nilai communalities jika semakin tinggi maka semakin tinggi pula persamaan pada hubungan dengan faktor yang terbentuk. Untuk nilai communalities yang terbentuk sesuai dengan Tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4. 14 Nilai Communalities

Communalities ^a		
Nama Faktor	Initial	Extraction
Teknologi	0.568	0.621
Infrastruktur	0.746	0.778
Lokasi	0.724	0.999
Akses	0.527	0.487
Kultur	0.639	0.563
Masyarakat	0.738	0.724
Pasar	0.601	0.391
Kebijakan	0.674	0.683
Peraturan Perundang Undangan	0.674	0.763
Kepemimpinan	0.487	0.468
Pemerintah Saat ini	0.486	0.532
Kesanggupan	0.704	0.590
Sikap	0.684	0.647
Inovasi	0.705	0.704
Norma Sosial	0.673	0.565
Sumber Daya Manusia	0.521	0.308
Dukungan	0.646	0.619

Setelah melihat nilai communalities di atas selanjutnya untuk melihat jumlah faktor yang terbentuk adalah dengan menggunakan ekstraksi faktor. Ekstraksi faktor pada penelitian ini adalah menggunakan metode maximum likelihood. Untuk melihat nilai ekstraksi faktor menggunakan hasil dari tabel total variance explained, dimana untuk hasil tabel tersebut sesuai dengan Gambar 4.11 berikut.

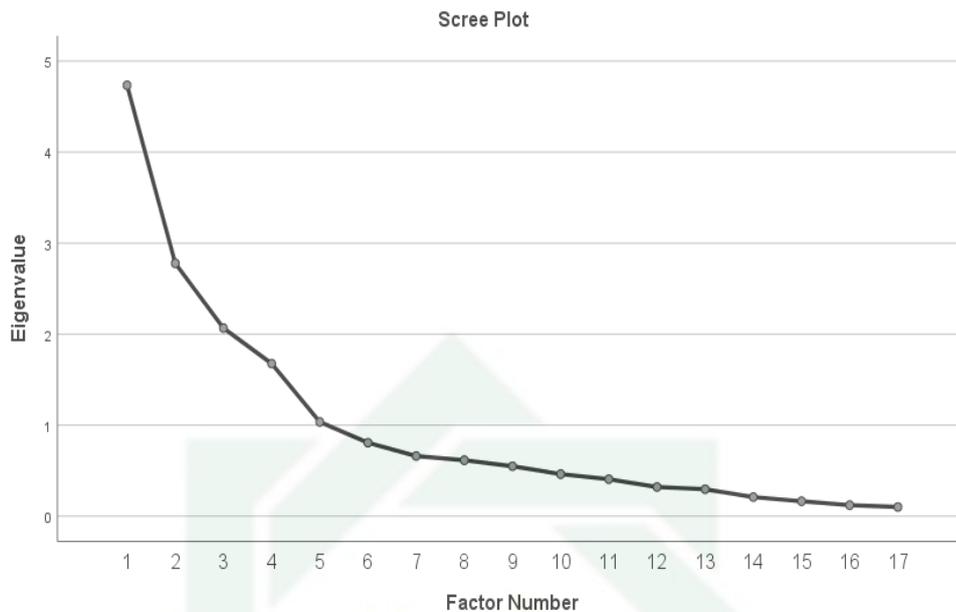
Factor	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.734	27.845	27.845	2.633	15.490	15.490	2.534	14.907	14.907
2	2.778	16.344	44.189	3.359	19.760	35.251	2.438	14.340	29.247
3	2.067	12.156	56.345	1.917	11.274	46.525	2.160	12.704	41.952
4	1.676	9.860	66.206	1.524	8.963	55.488	1.853	10.902	52.853
5	1.035	6.089	72.295	1.009	5.934	61.422	1.457	8.568	61.422
6	.807	4.747	77.041						
7	.661	3.886	80.927						
8	.614	3.614	84.541						
9	.549	3.227	87.768						
10	.462	2.717	90.485						
11	.406	2.388	92.873						
12	.321	1.886	94.759						
13	.296	1.740	96.499						
14	.209	1.232	97.731						
15	.164	.964	98.694						
16	.121	.712	99.406						
17	.101	.594	100.000						

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Gambar 4. 11 Tabel Variance Explained Provinsi Jawa Timur

Dari gambar 4.17 diatas dapat diketahui terdapat 5 faktor yang terbentuk 17 komponen yang dianalisis dikarenakan untuk menjadi suatu faktor nilai dari eigen value harus >1. Sedangkan untuk mengetahui faktor dominan dapat dilihat dari nilai eigen value yang tertinggi dari kelima faktor yang sudah terbentuk (Pratita dkk, 2018). Dari gambar tabel variance explained diatas nilai eigen value tertinggi ada pada faktor pertama dengan nilai eigenvalue 4.734, faktor kedua mempunyai nilai eigenvalue sebesar 2.778, faktor ketiga mempunyai nilai eigenvalue sebesar 2.067, nilai keempat mempunyai nilai eigen value sebesar 1.676 dan faktor yang terakhir yaitu faktor kelima mempunyai nilai eigenvalue sebesar 1.035.

Selain dari tabel total variance diatas ekstraksi faktor dapat dilihat dari gambar scree plot. Pada gambar scree plot untuk melihat titik henti ekstraksi adalah apabila nilai eigenvalue mempunyai nilai sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan satu (Aziza, 2017). Untuk gambar scree plot ada pada Gambar 4.12 sebagai berikut.



Gambar 4. 12 Gambar Scree Plot

Dari gambar diatas dapat dilihat jika nilai faktor terhenti pada faktor kelima dikarenakan setelah faktor kelima nilai eigenvalue pada gambar diatas mempunyai nilai kurang dari 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempunyai nilai eigenvalue adalah faktor pertama hingga kelima. Untuk mengetahui faktor pertama hingga kelima diisi oleh faktor apa saja menggunakan rotasi faktor. Rotasi faktor pada penelitian ini menggunakan Varimax untuk meminimalkan jumlah variabel yang memiliki nilai korelasi terhadap faktor yang terbentuk. Untuk mengetahui besaran korelasi antar variabel dengan kelima faktor dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4. 15 Rotate Component Matrix Provinsi Jawa Timur

	Factor				
	1	2	3	4	5
Kebijakan	.818				
Kepemimpinan	.652				
Peraturan Perundang Undangan	.582	.452	-.429		
Sikap	.514		.375	.492	
Inovasi	.513			.453	-.429

Akses	.440	.345			
Masyarakat		.814			
Kultur	.431	.590			
Teknologi		.568	521		
Social Norm		.564	.351		
Pasar		.476			.363
Infrastruktur			.858		
Dukungan			.710		
Pemerintah Saat ini				.671	
Kesanggupan				.663	
Sumber Daya Manusia				.424	
Lokasi		.300			.895

Dari Tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa faktor pertama diisi oleh faktor kebijakan yang mempunyai nilai korelasi terbesar dengan faktor pertama dengan nilai 0.818, faktor kepemimpinan yang mempunyai nilai korelasi terbesar dengan faktor pertama dengan nilai 0.652. Faktor peraturan perundang-undangan dengan nilai korelasi terbesar dengan faktor pertama dengan nilai 0.582 dari pada dengan faktor kedua dengan nilai korelasi sebesar 0.452 atau dengan faktor ketiga dengan nilai korelasi -0.429 maka faktor peraturan perundang undangan masuk dalam faktor pertama. Faktor sikap dengan nilai korelasi terbesar dengan faktor pertama dengan nilai 0.514 dari pada dengan faktor ketiga yang mempunyai nilai korelasi sebesar 0.375 dan pada faktor keempat dengan korelasi 0.492 maka faktor sikap masuk kedalam faktor pertama.

Faktor inovasi pada faktor pertama dengan nilai korelasi 0.513 dari pada dengan faktor keempat yang mempunyai nilai korelasi 0.453 dan dengan faktor kelima dengan nilai korelasi -0.429 maka faktor inovasi masuk kedalam faktor pertama. Faktor akses dengan faktor pertama mempunyai korelasi 0.513 dari pada dengan faktor kedua yang mempunyai nilai korelasi 0.345 maka faktor akses masuk kedalam faktor pertama. Jadi pada faktor pertama diisi oleh faktor kebijakan, kepemimpinan, peraturan perundang undangan, sikap, inovasi dan akses.

Faktor kedua diisi dengan faktor masyarakat dengan korelasi terbesar dengan faktor kedua 0.814. Faktor kultur dengan nilai korelasi terbesar dengan faktor kedua 0.590 dibandingkan dengan faktor pertama yang mempunyai nilai korelasi 0.431 maka faktor kultur masuk kedalam faktor kedua. Faktor teknologi yang mempunyai nilai korelasi terbesar dengan faktor kedua dengan nilai 0.568 dibandingkan dengan faktor ketiga yang mempunyai nilai korelasi 0.521 maka faktor teknologi masuk kedalam faktor kedua.

Faktor social norm yang mempunyai nilai korelasi terbesar dengan faktor kedua dengan nilai korelasi 0.564 dibandingkan dengan faktor ketiga yang mempunyai nilai korelasi sebesar 0.351 maka faktor norma sosial masuk kedalam faktor kedua. Faktor pasar dengan korelasi terbesar pada faktor kedua dengan nilai korelasi 0.476 dibandingkan dengan faktor kelima yang mempunyai nilai korelasi sebesar 0.363 maka faktor pasar masuk ke dalam faktor kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor kedua diisi oleh faktor masyarakat, kultur, teknologi, norma sosial dan pasar.

Faktor ketiga diisi oleh faktor infrastruktur dengan korelasi terbesar dengan faktor ketiga sebesar 0.858 dan faktor dukungan mempunyai nilai korelasi terbesar dengan faktor ketiga dengan nilai 0.710. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada faktor ketiga diisi oleh dua faktor yaitu faktor infrastruktur dan faktor dukungan.

Faktor keempat diisi oleh faktor pemerintah saat ini yang mempunyai nilai korelasi terbesar dengan faktor keempat dengan nilai 0.671. Faktor kesanggupan yang mempunyai nilai korelasi dengan faktor keempat dengan nilai 0.663 dan faktor SDM yang mempunyai nilai korelasi terbesar dengan faktor keempat dengan nilai 0.424. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor keempat diisi oleh faktor pemerintah saat ini, kesanggupan dan SDM.

Faktor kelima diisi oleh faktor lokasi yang mempunyai nilai korelasi terbesar dengan faktor kelima sebesar 0.895 dibandingkan dengan faktor kedua yang mempunyai nilai korelasi sebesar 0,300 jadi faktor lokasi berada pada faktor kelima. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor kelima hanya diisi oleh faktor lokasi.

4.8 Interpretasi Faktor

Setelah dilakukannya *Exploratory Factor Analysis* yang menghasilkan 5 faktor performa penerapan SPBE pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya dari kelima faktor tersebut akan diinterpretasi agar lebih mudah. Untuk interpretasi seperti pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4. 16 Interpretasi Faktor

Faktor	Item	Nama Faktor
Faktor pertama	kebijakan, kepemimpinan, peraturan perundang-undangan, sikap, inovasi, akses.	Regulasi SPBE
Faktor kedua	masyarakat, kultur, teknologi, norma sosial, pasar	Litterasi Digital
Faktor ketiga	infrastruktur dan dukungan	Manajemen Infrastruktur TI
Faktor keempat	pemerintah saat ini, kesanggupan, SDM	SDM
Faktor kelima	lokasi	Lokasi Sistem

Dari tabel diatas interpretasi faktor pertama bernama regulasi SPBE dikarenakan faktor yang berkorelasi dengan faktor yang pertama mempunyai keterkaitan dengan regulasi dimana pengertian regulasi itu sendiri yang merupakan sebuah konsep dan asas yang menjadi pegangan serta dasar dari sebuah rencana dalam melaksanakan suatu kepemimpinan, pekerjaan dan cara bertindak hal itu sesuai dengan item atau faktor yang berkorelasi dengan faktor pertama berisi mengenai kebijakan, kepemimpinan, peraturan perundang-undangan, sikap, inovasi dan akses.

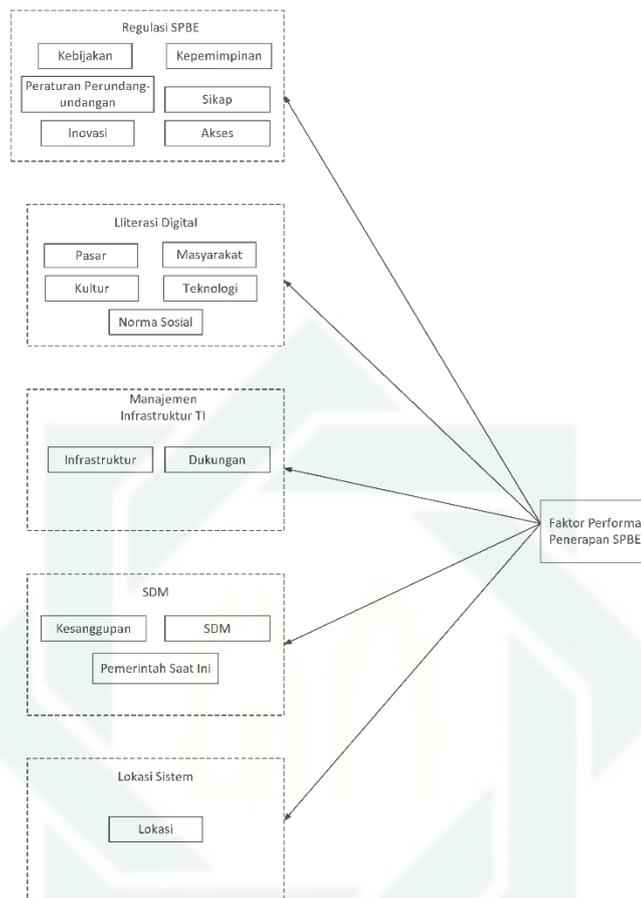
Untuk interpretasi faktor kedua bernama literasi digital dikarenakan faktor-faktor yang berkorelasi dengan faktor kedua mempunyai keterkaitan dengan literasi digital dimana pengertian literasi digital itu sendiri menurut Haque (Dalam Feri Sulianta, 2020 p.6) adalah sebuah keahlian dalam berbagi mengenai suatu hal dengan menggunakan teknologi informasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Atau dapat diartikan bahwa literasi digital merupakan sebuah keterampilan yang berupa menulis, membaca, mengakses atau menggunakan teknologi untuk mendapatkan sebuah informasi yang digunakan dalam tujuan tertentu.

Untuk interpretasi faktor ketiga bernama manajemen infrastruktur TI dikarenakan pada item atau faktor yang berkorelasi dengan faktor ketiga yaitu infrastruktur dan *support* mempunyai keterkaitan dengan manajemen infrastruktur TI itu sendiri dan hal itu sesuai dengan pengertian manajemen IT itu sendiri yaitu sebuah proses yang diawali dengan perencanaan, penganggaran dan pengawasan (Handoko, 2012 p.8), sebuah kombinasi dari sekumpulan jaringan komputer, perangkat lunak dan perangkat keras dan lainnya untuk mengendalikan layanan teknologi informasi (*ITIL V3, 2011*).

Untuk interpretasi faktor keempat bernama SDM atau Sumber Daya Manusia dikarenakan pada item atau faktor yang berkorelasi dengan faktor keempat berisi mengenai peran pemerintah saat ini, kesanggupan dan SDM dimana hal itu berkaitan dengan pengertian SDM. Dimana SDM itu merupakan hubungan dan juga peranan manusia yang efektif dan efisien agar dapat membantu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi (Hasibuan, 2016). Dan juga kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

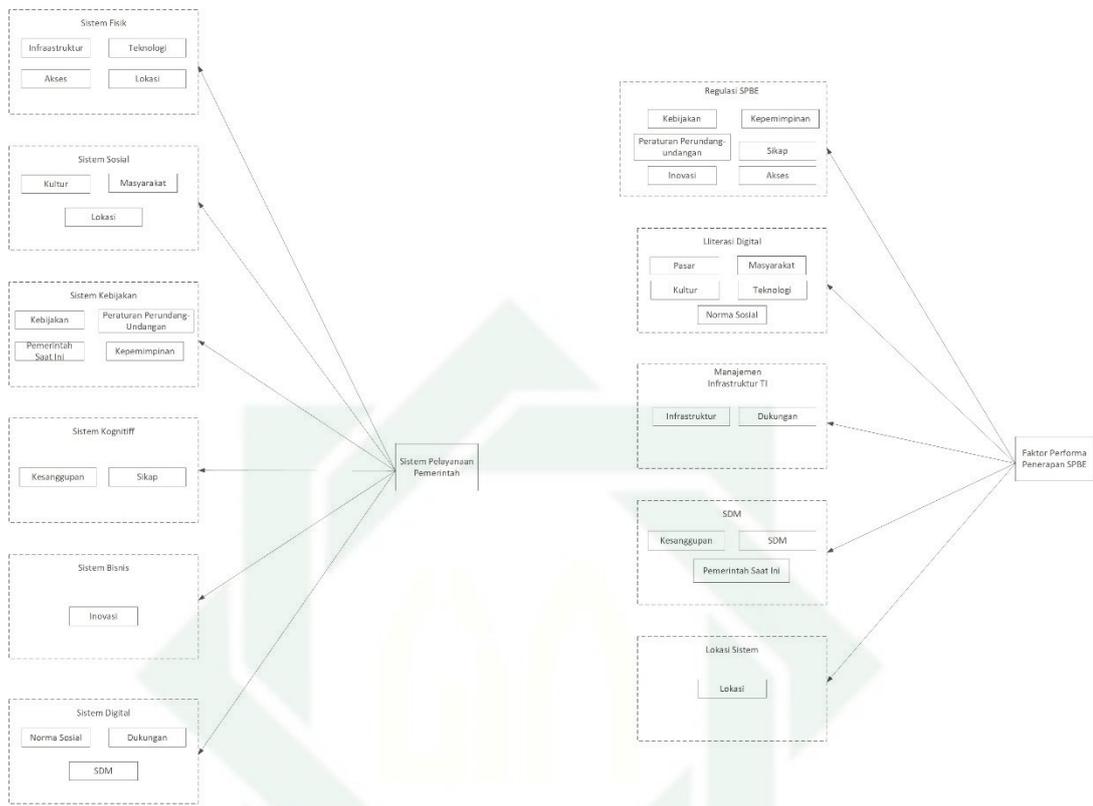
Untuk interpretasi faktor terakhir yaitu faktor kelima bernama lokasi sistem dikarenakan hanya satu item atau faktor yang berkorelasi dengan faktor kelima ini yaitu lokasi. Dimana lokasi yang dimaksud ini adalah lokasi sistem itu berada serta kondisi atau suasana lokasi sistem tersebut apakah sudah layak atau belum dijadikan sebagai tempat server dari system yang dibuat dan juga keamanan dari lokasi tersebut apakah dapat dijangkau dengan mudah atau tidak. Untuk lebih jelasnya kelima interpretasi faktor tersebut sesuai dengan Gambar 4.13 berikut ini.



Gambar 4. 13 Interpretasi Nama Faktor Performa

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa faktor performa penerapan SPBE di Jawa Timur dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu faktor regulasi SPBE, literasi digital, lokasi sistem, SDM dan manajemen infrastruktur TI. Untuk faktor yang dominan atau signifikan adalah faktor regulasi SPBE dikarenakan sesuai dengan analisis faktor di atas pada faktor pertama atau yang sekarang bernama faktor kebijakan SPBE mempunyai nilai nilai eigenvalue tertinggi yaitu 4.737. Dimana penentuan faktor dominan didasari oleh nilai eigenvalue yang tertinggi dari faktor yang terbentuk (Pratita dkk, 2018).

Setelah dilakukan interpretasi pada faktor yang terbentuk dari EFA terlihat perbedaan jumlah faktor dari hasil mapping yang sebelumnya dilakukan antara *Digital Service Provision System of System Framework* dengan PERMENPAN No. 59 Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya ada pada Gambar 4.14 sebagai berikut.



Hasil Mapping Framework Effective Digital Transformation dengan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020

Hasil Interpretasi Faktor Dari Exploratory Factor Analysis

Gambar 4. 14 Perbandingan Sebelum Dilakukan EFA dan Sesudah Dilakukan EFA

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa *framework effective digital transformation* setelah dilakukan mapping berdasarkan PERMENPAN No. 59 Tahun 2020 menghasilkan 17 indikator yang digunakan sebagai faktor performa yang dibagi dalam 6 variabel yaitu variabel sistem kebijakan dimana memuat indikator kebijakan, kepemimpinan, peraturan perundang-undangan dan pemerintah saat ini. Variabel sistem sosial yang memuat indikator pasar, kultur dan masyarakat. Variabel sistem fisik yang memuat indikator teknologi, infrastruktur, akses dan lokasi. Variabel sistem kognitif yang memuat indikator kesanggupan dan sikap. Variabel sistem bisnis yang memuat indikator inovasi dan variabel system digital yang memuat indikator norma sosial, dukungan dan SDM.

Setelah dilakukan *Exploratory Factor Analysis* dan diinterpretasikan menghasilkan 5 faktor dari 17 indikator yang dijadikan sebagai faktor performa dari mapping indikator *framework effective digital transformation*. Kelima faktor tersebut yaitu regulasi SPBE, literasi digital, SDM, manajemen infrastruktur TI dan lokasi sistem. Dimana faktor regulasi SPBE merupakan korelasi dari beberapa faktor yaitu kebijakan, kepemimpinan, peraturan perundang-undangan, sikap, inovasi dan akses. Faktor literasi digital merupakan korelasi dari faktor market, masyarakat, kultur, teknologi dan social norm. Faktor manajemen infrastruktur TI yang berkorelasi dari faktor infrastruktur dan support. Faktor SDM yang berkorelasi dari beberapa faktor yaitu kesanggupan, SDM dan pemerintah saat ini. Dan faktor lokasi system yang berkorelasi dengan faktor lokasi.

Dari penjelasan diatas penelitian ini mempunyai perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dimana pada penelitian ini menghasilkan komparasi faktor performa pada Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto dimana faktor performa tersebut diperoleh dari hasil mapping antara PERMENPAN No.59 Tahun 2020 dengan *framework effective digital transformation* yang ada pada disertasi Samantha Papavasillou dan dari penjelasan diatas penelitian ini juga menghasilkan usulan model faktor yang mempengaruhi penerapan SPBE yang dihasilkan dengan metode EFA serta pada penelitian ini juga menghasilkan faktor yang signifikan dari penerapan SPBE dari Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menampilkan serta menjelaskan mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian ini mulai dari awal hingga akhir dan juga pada bab ini juga menjelaskan mengenai saran peneliti kepada peneliti dimasa yang akan datang selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

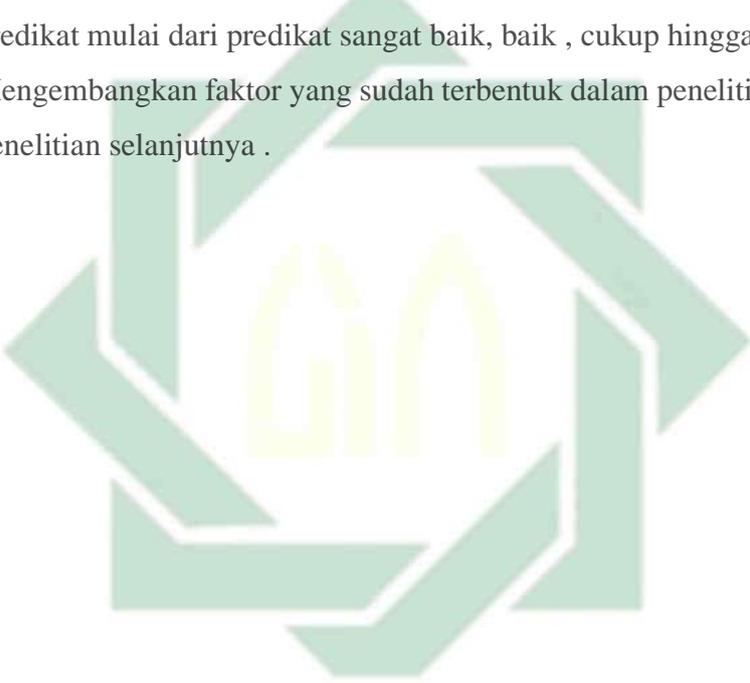
Dari seluruh penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto mempunyai 10 faktor performa yang relatif sama namun jika diperbesar atau dilihat lebih spesifik ke dalam lagi antara Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto memiliki karakteristik faktor performa yang berbeda. Untuk faktor performa yang sama yaitu lokasi, kultur, masyarakat, kebijakan, peraturan perundang-undangan, kepemimpinan, kesanggupan, sikap, sdm dan *support*. Pada Kota Surabaya memiliki 4 karakteristik faktor performa yaitu teknologi, akses, pemerintah saat ini dan inovasi sedangkan pada Kabupaten Mojokerto memiliki 3 karakteristik faktor performa yaitu infrastruktur, *market* dan *norma sosial*.
2. Setelah dilakukan *Exploratory Factor Analysis* (EFA) terdapat 5 faktor yang mempengaruhi performa penerapan SPBE di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Untuk faktor dominan yang mempengaruhi penerapan SPBE pada dua kota tersebut adalah faktor pertama dikarenakan faktor performa pertama memiliki eigenvalue tertinggi.
3. Untuk interpretasi faktor performa penerapan SPBE di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto yaitu faktor pertama yaitu regulasi SPBE. Faktor kedua yaitu literasi digital. Faktor ketiga yaitu manajemen infrastruktur TI. Faktor keempat yaitu SDM dan faktor kelima adalah lokasi system.

5.2 Saran

Pada penelitian ini mempunyai beberapa saran untuk pengembangan penelitian kedepannya yaitu sebagai berikut.

1. Untuk objek penelitian agar menggunakan hasil Evaluasi SPBE pada tahun 2021 atau yang terbaru dikarenakan pada penelitian ini menggunakan hasil Evaluasi SPBE yang lama pada tahun 2019.
2. Melakukan komparasi terhadap kota atau kabupaten dengan berbagai predikat mulai dari predikat sangat baik, baik , cukup hingga kurang.
3. Mengembangkan faktor yang sudah terbentuk dalam penelitian ini kedalam penelitian selanjutnya .



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Amalia, E., & Adietya, A. (2019). Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan *E-government* pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model. *JUMANJI (Jurnal Masyarakat Informatika Unjani)*, 3(01), 35. <https://doi.org/10.26874/jumanji.v3i01.50>
- Argawal, P. K. (2000). *Portals: The path to everything: Government Technology*.
- Astiarasanti, A. H. (2020). Pemantauan Dan Evaluasi Teknologi Informasi di Pemerintahan Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. *UISI Jurnal*.
- Ayu, I. G., Damayanthi, E., Lely, N. K., & Merkusiwati, A. (2015). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DOSEN AKUNTANSI PADA PERGURUAN TINGGI DI PROPINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia PENDAHULUAN Keberhasilan suatu Negara sangat tergantung pada sumber daya manusia*. 817–835.
- Besta, Y. (2020). (*Studi kasus : Aplikasi GOBIS*).
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. v. (2013). Digital business strategy: toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 471–482.
- Emerson, R. W. (2017). Exploratory factor analysis. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 111(3), 301–302.
<https://doi.org/10.1177/0145482x1711100313>
- Firdaus, M. A. R. (2019). *Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis*

Elektronik (Spbe) Pemerintah Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Spbe. 69.

Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika: teori, konsep dan aplikasi dengan SPSS 17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 50.*

Guo, Y. (2010). *E-Government: Definition, Goals, Benefits and Risks.*
<https://doi.org/10.1109/ICMSS.2010.5576557>

Henriette, E., Feki, M., & Boughzala, I. (2015). The Shape of Digital Transformation: A Systematic Literature Review. *MCIS 2015 Proceedings.*
<https://aisel.aisnet.org/mcis2015/10>

Indrajit, R. E., Rudianto, D., & Zainuddin, A. (2005). *E-government in action. Yogyakarta: Andi Offset, 264.*

Kapioru, H. E. (2014). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 3(1), 101–119.*
<https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V3I1.2157>

Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. *Business and Information Systems Engineering, 57(5), 339–343.*
<https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5>

Maulidhia, J. P. (2020). *Faktor-Faktor Sukses Penerapan E-government Pada Grms (Government Resources Management System) Di Kota Surabaya*
Repository - UNAIR REPOSITORY. UNAIR.

<https://repository.unair.ac.id/101253/>

MENPANRB. (2020). *Sekilas Peraturan Menteri PANRB No.59 Tahun 2020*. 59.

Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik* (Revisi Cet). Alfabeta.

Nabila, A. (2021). *Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Menggunakan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020*. 126.

Nofal, M. I., Al-Adwan, A. S., Yaseen, H., & Alsheikh, G. A. A. (2021). Factors for extending *e-government* adoption in Jordan. *Periodicals of Engineering and Natural Sciences*, 9(2), 471–490. <https://doi.org/10.21533/pen.v9i2.1824>

Nugraha, J. T. (2018). *E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)*. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42. <https://doi.org/10.31002/JKKM.V2I1.758>

Nugroho, S. (2008). *Statistika Mutivariat Terapan*. In *UNIB Press Bengkulu*.

Papavasiliou, S. (2020). *A Digital Transformation Governance Framework for eGovernment: A Systemic Approach*. <https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/126968>

PERPRES. (2018). *PERPRES No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Siber Dan Sandi Negara.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>

Pradika, Laksana, G., Darmawan, I., & Mulyana, R. (2019). *PERANCANGAN*

*TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DOMAIN APO COBIT 5 (STUDI KASUS:
DISKOMINFOTIK KBB) IT GOVERNANCE DESIGN FOR E-
GOVERNMENT ON APO DOMAIN COBIT 5 (STUDY CASE:
DISKOMINFOTIK KBB) Pradika Adhea Gevani Laksan. 6(2), 8384–8391.*

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information Systems Diterjemahkan oleh : Kiki Sakinah; Nur Safira dan Novita Puspasari. In *Lembaga Informasi:Bandung* (Vol. 3, Issue 2).

Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep dan Kondisi *E-government* di Indonesia. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)*, 1(1), 10–16.

<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=356188>

Suaedi, F., & Wardiyanto, B. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Graha Ilmu.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

<https://www.scirp.org/%28S%28351jmbntvnsjt1aadkozje%29%29/reference/referencpapers.aspx?referenceid=2909388>

Sugiyono. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. *Alfabeta, Bandung*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif,

- kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 15(2010).
- Sukemi, & Trisnawati, T. (2021). ANALISIS CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS (CFA) DAN EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS (EFA) PADA PENGEMBANGAN INSTRUMEN MOTIVASI BELAJAR SEKOLAH DASAR. *Journal Abacus*, 2(1996), 6.
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161.
<https://doi.org/10.24905/JIP.1.1.2016.141-161>
- Syahida, B. A. (2014). *SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*. 14.
- Watkins, M. W. (2018). Exploratory Factor Analysis: A Guide to Best Practice. *Journal of Black Psychology*, 44(3), 219–246.
<https://doi.org/10.1177/0095798418771807>
- Westerman, G., Calm ejane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., McAfee, A., & others. (2011). Digital Transformation: A roadmap for billion-dollar organizations. *MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting*, 1, 1–68.
- Wongso, F. (2016). PERANCANGAN SISTEM PENCATATAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PEKANBARU DENGAN METODE VISUAL BASIC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*,

13(2), 160–180. <https://doi.org/10.31849/JIEB.V13I2.848>

Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). *A Beginner 's Guide to Factor Analysis :
Focusing on Exploratory Factor Analysis*. 9(2), 79–94.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A